

KATA PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi potret perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan di Propinsi Riau pada triwulan IV - 2007 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB, Keuangan Daerah, Investasi, dan Ekspor-Impor), Inflasi, moneter dan perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan serta perkiraan perkembangan ekonomi daerah pada triwulan I - 2008. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Riau, data PMDN dan PMA dari BPI Propinsi Riau serta data dari instansi terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran dan dukungan *supply* data sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, Februari 2007
BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd

Gatot Sugiono
Pemimpin

DAFTAR	ISI
--------	-----

	HALAMAN
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
 RINGKASAN EKSEKUTIF	1
 BAB 1. KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	7
I Pertumbuhan PDRB.....	7
1. Kondisi Umum.....	7
2. PDRB Dari Sisi Permintaan.....	8
2.1. PDRB Tanpa Migas	8
2.2. PDRB Dengan Migas	11
3. PDRB dari Sisi Penawaran	13
3.1. PDRB Tanpa Migas	13
3.2. PDRB Dengan Migas	18
II Pengembangan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).....	21
1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA.....	21
2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA.....	25
III Perkembangan Ekspor-Impor Non Migas.....	26
1. Ekspor Non Migas.....	27
2. Impor Non Migas.....	29
3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran.....	30
IV Keuangan Daerah.....	32
1. Kondisi Umum.....	32

	2. APBD Provinsi Riau Tahun 2008	32
	3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau	33
BOKS 1	Produktifitas Sektor Ekonomi di Provinsi Riau	
BAB 2.	PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	35
	1. Kondisi Umum.....	35
	2. Perkembangan dan Faktor Penyebab Inflasi Kota Pekanbaru	36
	3. Perkembangan Komponen-komponen Inflasi di Kota Pekanbaru.....	41
BOKS 2	Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Kinerja Ekspor Riau	
BAB 3.	PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH.....	43
	1. Kondisi Umum.....	43
	2. Perkembangan Moneter	44
	3. Perkembangan Perbankan	45
	3.1. Bank Umum	45
	3.1.1. Jaringan Kantor	45
	3.1.2. Perkembangan Aset	47
	3.1.3. Kredit	47
	3.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit.....	48
	3.1.3.2. Konsentrasi Kredit	48
	3.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru	52
	3.1.3.4. Kualitas Kredit	53
	3.1.4. Intermediasi Perbankan	55
	3.1.4.1. Perkembangan LDR	55
	3.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM.....	56
	3.1.5. Kondisi Likuiditas	59
	3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga	59
	3.1.5.2. Rasio Alat Liquid	62
	3.1.6. Profitabilitas	63
	3.1.6.1. Spread Bunga	63

	3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	64
	3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi	66
	3.2. Bank Perkreditan Rakyat	66
	3.3. Bank Syariah	68
BAB 4	Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah.....	69
	1. Kondisi Umum.....	69
	2. Ketenagakerjaan Daerah	70
	3. Tingkat Pengangguran Daerah.....	74
	4. Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	76
BAB 5	Perkembangan Sistem Pembayaran.....	77
	1. Kondisi Umum.....	77
	2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.....	78
	2.1. Aliran uang masuk/keluar	78
	2.2. Penyediaan uang kartal layak edar.....	79
	2.3. Uang Palsu.....	79
	3. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.....	80
	3.1. Kliring.....	80
	3.2. Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	80
	4. Lainnya	81
	4.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing.....	81
	4.2. Strategi <i>Cash Centre</i>	82
BAB 6	Prospek Ekonomi	83
	Daftar Istilah	xii

DAFTAR	TABEL
--------	-------

HALAMAN

Tabel 1.1.	Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (% _{y-o-y}).....	10
Tabel 1.2.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	11
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% _{y-o-y}).....	12
Tabel 1.4.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	13
Tabel 1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% _{y-o-y}).....	15
Tabel 1.6.	Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	18
Tabel 1.7.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% _{y-o-y}).....	19
Tabel 1.8.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% _{y-o-y}).....	19
Tabel 1.9.	Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMDN di Provinsi Riau.....	21
Tabel 1.10.	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007).....	22
Tabel 1.11.	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007).....	22
Tabel 1.12.	Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMA di Provinsi Riau.....	23
Tabel 1.13.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	24
Tabel 1.14.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor di Prvinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	24
Tabel 1.15.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Negara Asal di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	25

Tabel 1.16.	Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Lokasi.....	26
Tabel 1.17.	Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Riau Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)	27
Tabel 1.18.	Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)	27
Tabel 1.19.	Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli Periode Januari - November 2006 dan 2007 (dalam juta USD)	29
Tabel 1.20.	Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)	30
Tabel 1.21.	Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau.....	30
Tabel 1.22.	Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran	31
Tabel 1.23.	Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam juta USD).....	31
Tabel 1.24.	Ringkasan APBD Provinsi Riau Tahun 2008	33
Tabel 1.25.	Ringkasan Dana Alokasi Umum Provinsi Riau Tahun 2008.....	33
Tabel 1.26.	Ringkasan Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau Tahun 2008.....	34
Tabel 2.1	Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan IV Tahun 2007.....	37
Tabel 2.2.	Perkembangan Komoditas Yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan IV Tahun 2007.....	39
Tabel 3.1.	Perkembangan Bank di Propinsi Riau.....	45
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Propinsi Riau (Desember 2007).....	46
Tabel 3.3.	Data ATM Perbankan Per Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.....	46
Tabel 3.4.	Posisi Kredit di Propinsi Riau.....	48
Tabel 3.5.	Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah)	51
Tabel 3.6.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)	52
Tabel 3.7.	Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau.....	53
Tabel 3.8.	NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau (juta rupiah)	55
Tabel 3.9.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	55

Tabel 3.10.	Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (juta rupiah).....	57
Tabel 3.11.	Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan (juta rupiah).....	57
Tabel 3.12.	Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah).....	58
Tabel 3.13.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau.....	58
Tabel 3.14.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau..	59
Tabel 3.15.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)	60
Tabel 3.16.	Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah)	60
Tabel 3.17.	Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Riau ...	61
Tabel 3.18.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau	61
Tabel 3.19.	Perkembangan Alat Likuid dan <i>Non Core Deposit</i>	62
Tabel 3.20.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS Di Provinsi Riau (juta rupiah).....	67
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS Di Provinsi Riau.....	67
Tabel 3.22	Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta rupiah)...	68
Tabel 4.1.	Struktur Penduduk Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	70
Tabel 4.2.	Jumlah Tenaga Kerja & Angkatan Kerja Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	71
Tabel 4.3	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau.....	72
Tabel 4.4.	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	73
Tabel 4.5.	Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja.....	73
Tabel 4.6.	Pengangguran Menurut Kelompok Umur.....	74
Tabel 4.7.	Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota.....	74
Tabel 4.8.	Produktifitas Kerja di Provinsi Riau.....	76
Tabel 5.1.	Perkembangan Kliring di Provinsi Riau.....	80
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi RTGS.....	81
Tabel 5.3.	Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing.....	81

DAFTAR	TABEL
--------	-------

HALAMAN

Tabel 1.1.	Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (% <i>,y-o-y</i>).....	10
Tabel 1.2.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% <i>,y-o-y</i>).....	11
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% <i>, y-o-y</i>).....	12
Tabel 1.4.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% <i>,y-o-y</i>).....	13
Tabel 1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% <i>,y-o-y</i>).....	15
Tabel 1.6.	Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% <i>,y-o-y</i>).....	18
Tabel 1.7.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% <i>,y-o-y</i>).....	19
Tabel 1.8.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% <i>,y-o-y</i>).....	19
Tabel 1.9.	Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMDN di Provinsi Riau.....	21
Tabel 1.10.	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007).....	22
Tabel 1.11.	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007).....	22
Tabel 1.12.	Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMA di Provinsi Riau.....	23
Tabel 1.13.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	24
Tabel 1.14.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor di Prvinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	24
Tabel 1.15.	Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Negara Asal di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007).....	25

Tabel 1.16.	Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Lokasi.....	26
Tabel 1.17.	Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Riau Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)	27
Tabel 1.18.	Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)	27
Tabel 1.19.	Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli Periode Januari - November 2006 dan 2007 (dalam juta USD)	29
Tabel 1.20.	Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)	30
Tabel 1.21.	Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau.....	30
Tabel 1.22.	Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran	31
Tabel 1.23.	Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam juta USD).....	31
Tabel 1.24.	Ringkasan APBD Provinsi Riau Tahun 2008	33
Tabel 1.25.	Ringkasan Dana Alokasi Umum Provinsi Riau Tahun 2008.....	33
Tabel 1.26.	Ringkasan Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau Tahun 2008.....	34
Tabel 2.1	Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan IV Tahun 2007.....	37
Tabel 2.2.	Perkembangan Komoditas Yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan IV Tahun 2007.....	39
Tabel 3.1.	Perkembangan Bank di Propinsi Riau.....	45
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Propinsi Riau (Desember 2007).....	46
Tabel 3.3.	Data ATM Perbankan Per Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.....	46
Tabel 3.4.	Posisi Kredit di Propinsi Riau.....	48
Tabel 3.5.	Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah)	51
Tabel 3.6.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)	52
Tabel 3.7.	Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau.....	53
Tabel 3.8.	NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau (juta rupiah)	55
Tabel 3.9.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	55

Tabel 3.10.	Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (juta rupiah).....	57
Tabel 3.11.	Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan (juta rupiah).....	57
Tabel 3.12.	Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah).....	58
Tabel 3.13.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau.....	58
Tabel 3.14.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau..	59
Tabel 3.15.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)	60
Tabel 3.16.	Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah)	60
Tabel 3.17.	Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Riau ...	61
Tabel 3.18.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau	61
Tabel 3.19.	Perkembangan Alat Likuid dan <i>Non Core Deposit</i>	62
Tabel 3.20.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS Di Provinsi Riau (juta rupiah).....	67
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS Di Provinsi Riau.....	67
Tabel 3.22	Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta rupiah)...	68
Tabel 4.1.	Struktur Penduduk Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	70
Tabel 4.2.	Jumlah Tenaga Kerja & Angkatan Kerja Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota.....	71
Tabel 4.3	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau.....	72
Tabel 4.4.	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	73
Tabel 4.5.	Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja.....	73
Tabel 4.6.	Pengangguran Menurut Kelompok Umur.....	74
Tabel 4.7.	Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota.....	74
Tabel 4.8.	Produktifitas Kerja di Provinsi Riau.....	76
Tabel 5.1.	Perkembangan Kliring di Provinsi Riau.....	80
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi RTGS.....	81
Tabel 5.3.	Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing.....	81

RINGKASAN EKSEKUTIF**I. GAMBARAN UMUM**

- Perkembangan Ekonomi Nasional dan internasional yang semakin tak menentu, tampaknya tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi regional Provinsi Riau. Krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat, naiknya harga minyak mentah di pasar dunia dan beberapa sentimen negatif ekonomi nasional seperti posisi IHSG yang mencatat kinerja yang tidak menggembirakan dipenghujung tahun 2007 tampaknya tidak berdampak negatif terhadap perekonomian Riau. Namun sebaliknya kenaikan harga minyak dunia, mengakibatkan kinerja ekspor komoditi pertanian di Riau (terutama CPO) mengalami lonjakan permintaan. Hal tersebut diperkuat oleh keyakinan konsumen yang mengalami pelonjakan signifikan baik terhadap perkembangan harga maupun terhadap kondisi ekonomi ke depan.
- Perkembangan ekonomi terus menunjukkan trend yang membaik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Secara umum, tingkat harga bergerak naik namun dengan *trend* peningkatan yang masih dalam batas wajar terutama ketika memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sikap optimisme masyarakat yang terus menguat terhadap kondisi ekonomi dan perkembangan harga ke depan mengalami peningkatan sehingga secara keseluruhan dapat mencerminkan naiknya daya beli (*puchasing power parity*). Hal tersebut diperkuat dengan cukup tingginya laju konsumsi

- Namun demikian, beberapa permasalahan ekonomi yang cukup krusial dan perlu mendapat perhatian serius di penghujung tahun 2007 ini, terkait dengan kendala distribusi barang terutama akibat naiknya harga kelompok volatile food yang besarnya cukup signifikan dan sekaligus dikhawatirkan dapat memicu terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Aksi para spekulan terhadap harga barang bahan makanan masih terus berlanjut dan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang akan berimplikasi luas terhadap kemampuan daya beli masyarakat.
- Di sektor perbankan, respon tingkat suku bunga bank di Riau mulai bergerak mengikuti penurunan suku bunga BI Rate. Sejak BI Rate diturunkan menjadi 8,25% pada pertengahan 2007 tampaknya telah mulai direspon secara positif oleh dunia perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil. Bergeraknya sektor riil akan memacu kegiatan perekonomian yang memberi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

II. ASESMEN MAKROEKONOMI REGIONAL

- Kinerja perekonomian Riau pada triwulan IV-2007 dibanding dengan triwulan sebelumnya yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 8,98%. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,45%.
- Ekspor menjadi motor penggerak roda ekonomi Riau yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,04%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya ekspor beberapa komoditas andalan seperti industri kertas dan bubur kertas, industri CPO dan minyak hewani, dan industri makanan, serta beberapa komoditas perikanan, dan perkebunan. Selanjutnya diikuti oleh konsumsi swasta tumbuh 10,75%, konsumsi

pemerintah tumbuh 9,79%, dan konsumsi rumah tangga tumbuh 8,14%. Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) tumbuh 7,77% yang meliputi antara lain pembangunan property & residential, mesin-mesin baru, komponen kendaraan bermotor, infrastruktur & investasi di sektor perkebunan.

- Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar dengan pertumbuhan sebesar 17,26%, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 13,87%, sektor bangunan sebesar 10,92%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,90%. Hal ini merupakan sinyal yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku dunia usaha dan perbankan untuk lebih mengembangkan portofolio usahanya.
- Namun demikian sektor pertanian yang diharapkan dapat menjadi basis dalam industrialisasi sektor pertanian (agrobusiness), pada triwulan laporan justru menjadi pertumbuhan terendah yaitu sebesar 6,97%. Hal ini merupakan permasalahan serius yang harus cepat dicarikan solusinya. Nampaknya realisasi terhadap rencana Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) merupakan solusi yang harus segera diwujudkan. Apalagi mayoritas angkatan kerja di Riau (sekitar 90%) bergerak di sektor pertanian, sehingga upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sangat memerlukan dukungan dari industrialisasi di sektor pertanian tersebut. Begitu pula dengan sektor listrik, gas dan air bersih hanya tumbuh sebesar 6,03% dan sekaligus hal ini dapat merefleksikan adanya permasalahan mendasar di sektor ini. Apalagi dengan adanya rencana pemerintah daerah untuk menggeliatkan iklim investasi dan industrialisasi di Riau dapat mengalami hambatan apabila permasalahan listrik dan infrastruktur lainnya tidak segera diatasi dengan cepat.
- Kondisi infrastruktur di Riau selama tahun 2007 ditandai dengan krisis yang terjadi pada pelayanan publik seperti listrik, air bersih dan jalan. Tahun 2006/2007 merupakan puncak krisis listrik yang sangat memberatkan masyarakat di Riau. Sepanjang tahun, proses pemadaman bergilir semakin intensif dengan jangka waktu yang semakin lama. (Dalam sehari \pm 3 kali pemadaman dengan jangka waktu bervariasi). Begitu pula dengan kondisi jalan

propinsi yang kondisinya sangat memprihatinkan. Diperkirakan 30-40% jalan propinsi sudah mengalami kerusakan berat sehingga hal ini dapat mengurangi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pengamatan terakhir, banyak hasil panen kelapa sawit rakyat yang akhirnya membusuk dan tidak dapat dijual akibat kondisi jalan yang rusak parah sehingga tidak dapat dilalui kendaraan angkutan. Sehingga apabila permasalahan infrastruktur tersebut tidak diselesaikan pada akhirnya dapat menjadi masalah serius terutama dalam program pengentasan kemiskinan.

III. ASESMEN INFLASI

- Perkembangan tingkat harga secara umum di Riau pada triwulan IV tahun 2007 terus bergerak naik. Inflasi tahunan Riau (*year on year*) per Desember 2007 sebesar 7,53%, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,32%, terutama akibat adanya gejolak harga menjelang Ramadhan & Idul Fitri serta liburan akhir tahun.
- Secara triwulanan, inflasi Riau sebesar 3,31% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,92%. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 2,09%. Terjadinya laju inflasi tersebut terutama dipicu oleh ulah para spekulan terutama pada saat bulan Ramadhan & Idul Fitri dan penghujung tahun 2007. Hal ini diperkuat dari cukup tingginya angka inflasi yang berasal dari volatile food yang mencapai sebesar 5,69% dengan andil 0,17%. Begitu pula dengan sumbangan dari inflasi inti angkanya tercatat sebesar 3,20% dengan andil 1,71%. Kondisi ini sekaligus membuktikan bahwa tingginya permintaan uang tunai dari masyarakat di Riau ternyata cukup rentan dalam memicu laju inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah antisipasi, terutama pada saat tingginya indikator permintaan uang tunai di masyarakat.

IV. ASSES MEN KEUANGAN

Perbankan Riau

- Indikator utama perbankan di Riau hingga triwulan IV-2007 semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh 4,23%, sementara penyaluran kredit hanya tumbuh sebesar 2,65%.
- Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit terkonsentrasi pada sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yang mencapai 21,55% dari total kredit atau mencapai Rp.3.375 miliar. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.078 miliar (61,59%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh peningkatan aktivitas ekonomi di Riau. Dengan melihat perkembangan yang menggembirakan untuk kredit pada sektor perdagangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penyaluran kredit oleh perbankan sudah sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah yang terlihat dari besarnya peranan sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang pada triwulan laporan juga menunjukkan peningkatan.
- Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp.3.139 miliar atau mencapai 20,04% dari total kredit. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.713 miliar (86,43%) merupakan kredit kepada subsektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada subsektor perkebunan terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau 27% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 5,54 juta hektar.
- Di sisi lain, subsektor peternakan terus menunjukkan peningkatan sejak triwulan IV-2006. Pada triwulan laporan, kredit kepada subsektor peternakan mencapai Rp.4,63 miliar, meningkat Rp.673 juta atau 17,02% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan adanya pengembangan

peternakan seperti sapi dan kambing yang akhir-akhir ini gencar dilaksanakan di Provinsi Riau.

- Satu hal yang masih harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya dunia perbankan adalah masih rendahnya angka Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sampai dengan triwulan IV-2007 hanya mencapai 52,06% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 52,86%.
- Namun satu prestasi yang patut disyukuri adalah dengan berhasil perbankan di Riau dalam menjaga kualitas aktiva produktif. Hal ini terlihat dari cukup rendahnya angka Non Performing Loans (NPLs) yang pada triwulan IV-2007 hanya tercatat sebesar 3,08% atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,20%.

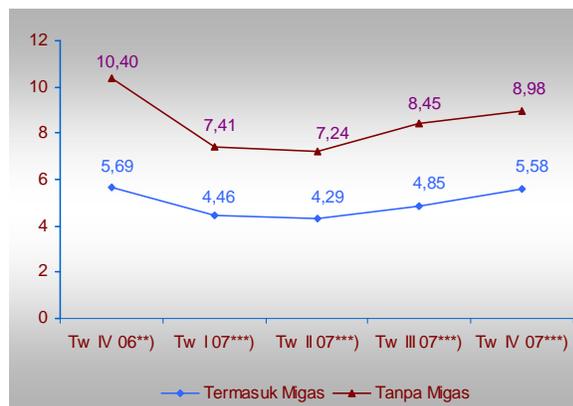
*Bab 1***KONDISI EKONOMI****MAKRO REGIONAL****I. Pertumbuhan PDRB****1. Kondisi Umum**

Memasuki triwulan IV-2007, perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Semakin mengeliatnya aktivitas ekonomi Riau karena kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi terutama konsumsi Hari Raya, konsumsi menjelang akhir tahun, dan pelaksanaan proyek pembangunan baik pemerintah maupun swasta yang memasuki tahap akhir juga turut meningkatkan kegiatan ekonomi di Riau pada triwulan laporan.

Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 8,98%, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 10,40%, namun meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 8,45%. Sementara itu, dengan memperhitungkan migas pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 5,58%, juga melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 5,69%, namun juga masih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,85%.

Namun secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2007 tanpa migas tercatat sebesar 8,04% dan pertumbuhan dengan migas sebesar 4,80%. Pertumbuhan selama tahun 2007 ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2006 baik tanpa migas maupun dengan migas yang masing-masing tercatat sebesar 8,66% dan 5,15%.

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Riau (%y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

2. PDRB dari Sisi Permintaan

2.1. PDRB Tanpa Migas

Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai 8,98%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2007.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor yaitu sebesar 12,04%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya ekspor beberapa komoditas andalan seperti industri kertas dan bubur kertas, industri CPO dan minyak hewani, dan industri makanan, serta beberapa komoditas perikanan, dan perkebunan.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba yakni sebesar 10,75%. Pertumbuhan pada komponen ini diperkirakan didorong oleh beberapa kegiatan bernuansa adat dan kebudayaan melayu serta kegiatan sosial yang melibatkan organisasi sosial dan kemasyarakatan di berbagai kabupaten/kota.

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 9,79%, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah untuk pembelian barang dan inventaris, peningkatan pengeluaran belanja pegawai seperti gaji karena bertambahnya PNS baru, dan pembiayaan penyusutan barang modal atas pemakaian barang modal.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 8,14%. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat seperti pegawai negeri, pegawai swasta, petani perkebunan dan perikanan, merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut. Kondisi ini juga seiring dengan derasnya impor bahan makanan dan bukan makanan ke Provinsi Riau.

Pertumbuhan komponen impor mencapai 7,97%, terutama karena meningkatnya komponen barang modal (mesin-mesin pabrik), bahan baku untuk proses produksi (bahan kertas dan pupuk), peralatan listrik, bahan bangunan, dan bahan makanan.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan terendah yaitu 7,77%. Pertumbuhan pada komponen ini didorong oleh maraknya pembangunan tempat dan bangunan bukan tempat tinggal tinggal (*property* dan *residential*), serta pemakaian mesin-mesin baru atau perbaikan mesin-mesin dan penggunaan kendaraan bermotor oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pembukaan lahan baru, peremajaan tanaman perkebunan, dan hutan tanaman industri juga menjadi pemicu pada pertumbuhan komponen PMTB tersebut.

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,93	7,71	7,56	7,69	8,14
	a. Makanan	8,06	6,59	6,41	6,55	7,49
	b. Non Makanan	7,87	8,30	8,17	8,28	8,49
2	Konsumsi Lembaga Swasta	11,22	10,22	9,13	7,22	10,75
3	Konsumsi Pemerintah	12,06	9,11	8,67	9,64	9,79
4	PMTB	9,34	10,17	8,06	9,03	7,77
5	Perubahan Stock	-39,09	-1,55	-35,65	-83,31	48,74
6	Ekspor	8,92	6,67	7,47	9,13	12,04
	a. Antar Negara	9,30	6,66	7,49	9,33	12,45
	b. Antar Daerah	6,13	6,71	7,30	7,70	8,96
7	Impor	10,62	8,99	9,75	11,32	7,97
	a. Antar Negara	8,72	5,25	9,25	10,73	11,22
	b. Antar Daerah	11,95	11,56	10,09	11,73	5,77
	Total	10,40	7,41	7,24	8,45	8,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari struktur PDRB ekonomi Riau tanpa migas dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 52,76% terhadap PDRB Riau. Tingginya kontribusi komponen ini menunjukkan bahwa peran konsumsi rumah tangga masih sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Riau.

Selanjutnya komponen ekspor dan impor memberikan kontribusi masing-masing sebesar 38,79% dan 31,74% terhadap PDRB Riau. Kontribusi kedua komponen ini telah memberikan perputaran dan distribusi barang dan jasa yang cukup nyata dalam menggerakkan perekonomian Riau. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan untuk dapat terus memompa segala potensi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi bagi kemajuan perekonomian Riau.

Komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 18,94%. Peningkatan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, karena komponen PMTB sangat terkait dengan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Sementara konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 17,46%. Kontribusi konsumsi pemerintah meningkat baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 maupun dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terkait dengan meningkatnya total

APBD Pemprov dan kabupaten/kota pada tahun 2007 dan meningkatnya realisasi APBD pada triwulan IV–2007.

Sementara itu, komponen konsumsi lembaga swasta memberikan kontribusi sebesar dan 0,51%. Meskipun kontribusi komponen ini relatif kecil, namun pertumbuhan komponen ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan komponen ini pada akhirnya akan memberikan peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian Riau.

Tabel 1.2. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	50,80	48,77	48,41	49,29	52,76
	a. Makanan	17,45	16,48	16,80	17,21	17,96
	b. Non Makanan	33,34	32,29	31,61	32,09	34,80
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,50	0,50	0,48	0,49	0,51
3	Konsumsi Pemerintah	12,89	12,32	12,00	13,70	17,46
4	PMTB	21,49	20,48	19,01	19,44	18,94
5	Perubahan Stock	1,54	4,03	4,40	5,11	3,29
6	Ekspor	44,10	42,26	45,20	42,55	38,79
	a. Antar Negara	41,22	39,47	42,12	39,71	36,14
	b. Antar Daerah	2,89	2,79	3,08	2,84	2,65
7	Impor	31,32	28,37	29,49	30,59	31,74
	a. Antar Negara	13,54	12,25	12,40	12,49	14,76
	b. Antar Daerah	17,78	16,12	17,09	18,09	16,98
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

2.2. PDRB dengan Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas tercatat sebesar 5,58% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III–2007. Dengan memasukkan migas maka pertumbuhan beberapa komponen mengalami perubahan, karena kontribusi yang dimiliki oleh komponen migas dalam perekonomian Provinsi Riau cukup besar. Komponen yang mengalami perubahan tersebut adalah PMTB, ekspor dan impor.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan migas tumbuh sebesar 6,65%, lebih tinggi baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 maupun dengan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan investasi di bidang migas baik untuk pemeliharaan peralatan dan infrastrukturnya maupun untuk pencarian sumur-sumur produksi baru.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor dengan migas mencapai 8,71%, yang diduga didorong oleh tingginya permintaan atas komoditas CPO, kertas, minyak dan gas bumi. Di sisi lain, pertumbuhan komponen impor mencapai 9,78%, yang diperkirakan karena permintaan domestik terhadap migas yang masih relatif tinggi untuk pemakaian bahan bakar pada industri, listrik transportasi dan rumah tangga.

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,93	7,71	7,56	7,69	8,14
	a. Makanan	8,06	6,59	6,41	6,55	7,49
	b. Non Makanan	7,87	8,30	8,17	8,28	8,49
2	Konsumsi Lembaga Swasta	11,22	10,22	9,13	7,22	10,75
3	Konsumsi Pemerintah	12,06	9,11	8,67	9,64	9,79
4	PMTB	4,69	5,46	5,29	5,81	6,65
5	Perubahan Stock	34,90	-0,40	-11,68	-6,52	-28,08
6	Ekspor	3,06	4,27	4,91	6,09	8,71
	a. Antar Negara	3,00	4,29	4,97	6,17	8,89
	b. Antar Daerah	4,03	3,87	3,92	4,73	5,62
7	Impor	7,97	8,56	7,51	10,01	9,78
	a. Antar Negara	3,36	4,41	4,28	5,33	8,08
	b. Antar Daerah	11,67	11,72	9,94	13,52	11,03
	Total	5,69	4,46	4,29	4,85	5,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari struktur PDRB Propinsi Riau dengan migas menurut sisi penggunaan, komponen ekspor memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 54,14%. Sedangkan kontribusi komponen impor sebesar 17,31%. Dengan kondisi tersebut kontribusi ekspor *netto* mencapai sebesar 36,82% yang menunjukkan bahwa peran migas di Riau masih sangat dominan. Kecenderungan permintaan migas yang cukup tinggi oleh pasar global diharapkan dapat menjadi pendorong dalam melakukan terobosan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Sementara itu, komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 23,28% yang menunjukkan peran kegiatan investasi fisik dari seluruh aktivitas ekonomi masih relatif besar. Besarnya potensi sumber daya alam di provinsi Riau merupakan salah satu faktor penting dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi.

Tabel 1.4. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07**)	Tw III 07**)	Tw IV 07**)
1	Konsumsi Rumah Tangga	28,49	27,77	27,89	28,31	26,29
	a. Makanan	9,79	9,38	9,68	9,88	8,95
	b. Non Makanan	18,70	18,38	18,22	18,43	17,34
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25
3	Konsumsi Pemerintah	7,23	7,01	6,91	7,87	8,70
4	PMTB	23,27	22,48	22,17	23,72	23,28
5	Perubahan Stock	5,84	4,86	4,53	5,23	4,65
6	Ekspor	53,11	54,92	55,66	53,53	54,14
	a. Antar Negara	50,69	52,55	53,28	51,10	50,39
	b. Antar Daerah	2,42	2,37	2,39	2,43	3,75
7	Impor	18,22	17,32	17,45	18,95	17,31
	a. Antar Negara	8,24	8,11	8,01	7,98	8,20
	b. Antar Daerah	9,99	9,21	9,44	10,97	9,11
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara

***) angka sementara

3. PDRB dari Sisi Penawaran

3.1. PDRB Tanpa Migas

Pada triwulan IV-2007, sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 17,26%. Tingginya pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh peningkatan eksplorasi dan eksploitasi komoditas produksi batu bara di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

Selanjutnya, sektor keuangan (keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan) tumbuh sebesar 13,87% yang diperkirakan masih didorong oleh penyaluran kredit, khususnya kredit konsumsi menjelang Hari Raya dan Tahun Baru dan kredit kepada perumahan. Selain itu, perkembangan perekonomian dan pembangunan yang relatif cepat di Riau telah berdampak pada berdirinya jasa penunjang keuangan seperti usaha perantara sekuritas, lembaga perkreditan rakyat dan koperasi, jasa perusahaan baru seperti jasa hukum dan advokasi, jasa akuntansi, dan jasa konsultasi konstruksi, dan jasa penyewaan bangunan seperti jasa sewa rumah dan sewa ruko.

Pertumbuhan ekonomi pada sektor bangunan yaitu mencapai 10,92% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Adanya pembangunan perumahan, ruko, gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang meningkat cukup signifikan

serta perbaikan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan pemerintah turut andil dalam pertumbuhan sektor ini.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 10,90% yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada semua subsektor pendukungnya. Konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup besar pada subsektor perdagangan baik pada retail besar maupun pasar tradisional (retail kecil). Pertumbuhan subsektor perdagangan mencapai 10,91% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2007. Peningkatan pada sub sektor perhotelan didukung oleh banyaknya even berskala nasional dan internasional seperti Festival Film Indonesia, Festival Budaya Melayu Sedunia, dan pelatihan-pelatihan juga seminar yang diadakan oleh instansi swasta maupun pemerintah yang diselenggarakan di Provinsi Riau. Sementara itu, pola konsumsi masyarakat Riau di luar rumah dan adanya beberapa kegiatan di atas turut meningkatkan nilai tambah di subsektor restoran.

Selanjutnya, sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 9,76%, yang didorong oleh pertumbuhan jasa pemerintahan dan jasa swasta. Pertumbuhan pada subsektor jasa pemerintahan didorong oleh adanya pengeluaran untuk upah/gaji, insentif hari raya, dan penyusutan barang modal dari aset pemerintah. Sementara sektor jasa swasta berasal pertumbuhan jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Hal ini seiring dengan adanya liburan panjang pada triwulan laporan.

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,03%, yang didukung oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman, industri kelapa sawit, industri pulp and paper, industri garmen serta industri mebel. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tercatat sebesar 8,80%. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan pemakaian pulsa oleh pengguna telepon seluler karena semakin mudah dan murah akses serta harga yang ditawarkan oleh para provider yang didukung juga oleh perluasan jangkauan jaringan. Sementara peningkatan pertumbuhan pada subsektor pengangkutan disebabkan adanya peningkatan jumlah penumpang terutama menjelang liburan panjang Hari Raya dan Tahun Baru serta keperluan dinas maupun bisnis.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 6,97%, dengan pertumbuhan subsektor tertinggi pada subsektor perkebunan dan subsektor peternakan yaitu 10,12% dan 8,42%. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor perkebunan disebabkan adanya peningkatan produksi kelapa sawit, karet, dan kelapa karena peningkatan permintaan yang cukup tinggi. Sementara itu, naiknya permintaan terhadap hasil peternakan terutama produk daging, telur, dan ayam membuat masyarakat mengantisipasinya dengan mengkonsumsi ikan yang harganya relatif stabil dan produksinya melimpah.

Sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 6,23%, namun meningkat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan subsektor listrik tergolong cukup tinggi namun masih terbatasnya persediaan daya di Riau untuk mencukupi kebutuhan listrik untuk rumah tangga maupun industri masih menjadi masalah utama, selain itu besarnya beban biaya operasional penyaluran listrik mengakibatkan sektor ini belum bisa berkembang optimal. Sementara itu, masih kurangnya minat masyarakat untuk memakai air dari perusahaan air minum karena masih rendahnya kualitas air yang dihasilkan perusahaan air minum tersebut, menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan subsektor air bersih.

Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Pertanian	7,51	4,27	4,99	5,99	6,97
2	Pertambangan dan Penggalian	37,67	25,28	14,56	15,41	17,26
3	Industri Pengolahan	11,93	9,52	8,28	9,19	9,03
4	Listrik dan Air Bersih	6,25	4,93	5,26	6,03	6,23
5	Bangunan	10,64	8,20	8,41	11,76	10,92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,54	8,69	8,97	10,39	10,90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,00	9,19	8,41	8,67	8,80
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	20,61	11,83	9,03	12,15	13,87
9	Jasa-jasa	11,24	9,04	8,39	9,23	9,76
	PDRB Tanpa Migas	10,40	7,41	7,24	8,45	8,98

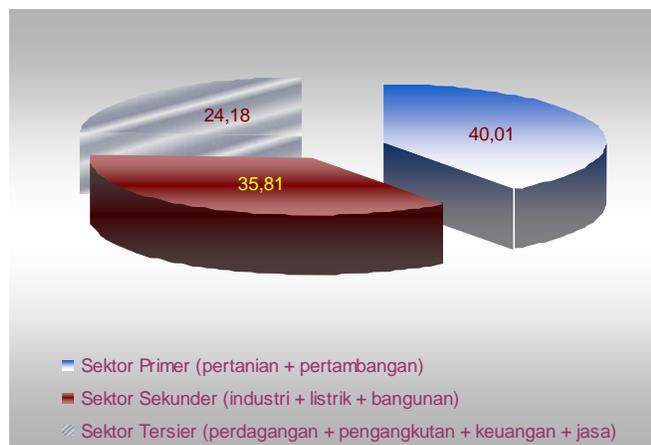
Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara

**) angka sementara

Secara umum kegiatan ekonomi Riau pada triwulan IV-2007 menunjukkan trend peningkatan sejak awal tahun 2007, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2007 tanpa migas tercatat sebesar 8,04% dan dengan migas sebesar 4,80%, sementara itu pertumbuhan selama tahun 2006 tanpa migas mencapai 8,66% dan dengan migas sebesar 5,15%.

Grafik 1.2. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% ,y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : (***) angka sangat sementara

(**) angka sementara

Bila dilihat dari distribusinya, masih didominasi oleh sektor primer yaitu sekitar 39,2% terhadap perekonomian Riau, dimana 37,42% peranan sektor ini utamanya disumbang oleh sektor pertanian yang diperkirakan berasal dari subsektor perkebunan karena peningkatan produksi komoditas kelapa sawit yang telah banyak mendorong nilai tambah subsektor ini. Selain kelapa sawit, komoditas karet dan kelapa yang memiliki area perkebunan cukup luas dan produksinya relatif baik juga memberikan kontribusi yang cukup berarti. Selanjutnya, subsektor kehutanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Riau, walaupun pertumbuhannya kecil. Peningkatan harga komoditas kayu telah mendorong peningkatan nilai tambah subsektor kehutanan.

Selanjutnya sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 27,51%, peran yang besar pada sektor ini terutama ditopang oleh peran industri kertas dan barang dari kertas, serta industri makanan, minuman dan tembakau. Permintaan yang cukup tinggi akan komoditas kertas, bahan dari kertas serta CPO (*Crude Palm Oil*) di pasaran internasional telah meningkatkan produksi komoditas ini. Selain itu mulai berkembangnya industri-industri kecil seperti industri garmen dan mebel di Riau, juga sedikitnya mampu meningkatkan nilai tambah sektor industri.

Sementara kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran tercatat sebesar 13,20%. Meningkatnya transaksi jual beli di wilayah Riau, serta ditunjang oleh daya beli masyarakat Riau yang relatif stabil (terutama untuk pembelian produk tahan lama seperti kendaraan bermotor roda dua dan empat, barang elektronik seperti TV, radio, komputer, telepon genggam) menjadikan sektor perdagangan di daerah Riau menjadi berkembang pesat terutama di wilayah perkotaan.

Selain sektor-sektor tersebut, sektor jasa-jasa juga telah menunjukkan perkembangan yang baik, dengan memberikan kontribusi sebesar 5,44%. Kontribusi ini terutama dihasilkan dari penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah/gaji, insentif dan penyusutan barang modal yang relatif membaik.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi 3,17%. Tumbuhnya jasa penyewaan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti untuk perkantoran dan usaha, ditambah dengan munculnya bank-bank baru, baik yang konvensional maupun syariah, dan lembaga keuangan lain seperti asuransi telah mendorong perkembangan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi peningkatan di sektor angkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 3,37% yang didorong oleh meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi seperti bertambahnya armada dan penumpang angkutan darat, laut, dan udara serta peningkatan jaringan telepon terutama telepon seluler di daerah. Peningkatan ketiga subsektor ini diharapkan dapat menjadi penunjang sektor ekonomi lainnya dan diharapkan kontribusinya akan terus mengalami peningkatan.

Kontribusi terendah pada triwulan IV-2007 terjadi pada sektor listrik dan air bersih yaitu 0,34%. Pengelolaan listrik dan air bersih yang belum optimal menjadikan kontribusi sektor ini masih relatif kecil. Pembangunan PDAM baru di Riau yang bekerjasama dengan investor dari Belanda diharapkan akan dapat meningkatkan peranan subsektor ini pada triwulan mendatang.

Tabel 1.6. Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Pertanian	38,03	38,64	37,60	37,28	38,24
2	Pertambangan dan Penggalian	1,57	1,45	1,59	1,80	1,77
3	Industri Pengolahan	29,75	30,55	31,98	30,49	27,51
4	Listrik dan Air Bersih	0,36	0,34	0,33	0,32	0,34
5	Bangunan	4,86	4,32	4,46	6,01	7,96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,40	11,93	11,56	11,79	12,20
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,47	3,28	3,18	3,15	3,37
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	3,35	3,56	3,43	3,48	3,17
9	Jasa-jasa	6,21	5,93	5,87	5,67	5,44
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara

***) angka sementara

3.1. PDRB dengan Migas

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas mengalami perubahan yang cukup signifikan pada 2 sektor yaitu sektor pertambangan (pertambangan dan penggalian) dan sektor industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 3,06% dan 7,32%.

Industri pengolahan di Riau mengalami pertumbuhan 7,32%, yang ditopang oleh pertumbuhan industri non migas, sementara industri migas hanya tumbuh 2,52%. Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu 3,06%. Mulai menipisnya persediaan minyak serta belum maksimalnya kapasitas produksi pertambangan migas yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan tersendatnya pasokan produksi kilang minyak di Dumai menjadi penyebab menurunnya kegiatan migas di Riau selama tahun 2007.

Tabel 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Pertanian	7,51	4,27	4,99	5,99	6,97
2	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,50	2,27	2,26	3,06
3	Industri Pengolahan	9,35	7,43	6,09	6,83	7,32
4	Listrik dan Air Bersih	6,25	4,93	5,26	6,03	6,23
5	Bangunan	10,64	8,20	8,41	11,76	10,92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,54	8,69	8,97	10,39	10,90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,00	9,19	8,41	8,67	8,80
8	Kuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	20,61	11,83	9,03	12,15	13,87
9	Jasa-jasa	11,24	9,04	8,39	9,23	9,76
PDRB dengan Migas		5,69	4,46	4,29	4,85	5,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari struktur perekonomian Riau dengan memasukan unsur migas, maka sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 49,19%, dengan didominasi oleh peranan sub sektor pertambangan migas yaitu mencapai 48,31%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 19,06% yang didominasi oleh subsektor perkebunan dan kehutanan yang masing-masing mencapai 9,61% dan 6,19%. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 15,57%, sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,08%, sektor bangunan sebesar 3,97%, sektor jasa-jasa sebesar 2,71%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,68%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,58%, dan kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik & air bersih yaitu sebesar 0,17%.

Tabel 1.8. Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (%y-o-y)

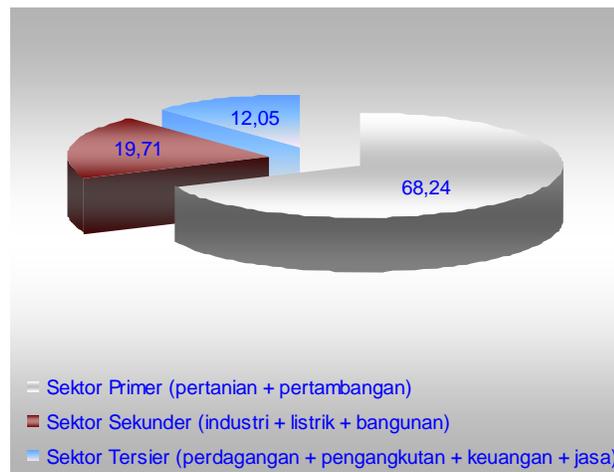
No.	Komponen	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)	Tw IV 07***)
1	Pertanian	21,33	22,00	21,67	21,42	19,06
2	Pertambangan dan Penggalian	43,03	42,15	41,48	41,90	49,19
3	Industri Pengolahan	18,45	19,14	20,24	19,21	15,57
4	Listrik dan Air Bersih	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17
5	Bangunan	2,72	2,46	2,57	3,45	3,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,95	6,79	6,66	6,77	6,08
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,94	1,87	1,83	1,81	1,68
8	Kuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	1,88	2,03	1,98	2,00	1,58
9	Jasa-jasa	3,48	3,37	3,38	3,26	2,71
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Dilihat dari aktifitas ekonomi, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi hingga 68,24%. Selanjutnya, sektor sekunder yaitu industri, listrik dan bangunan sebesar 19,71%. Sementara sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 12,05%.

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulan (% , y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
Keterangan : (***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Melihat besarnya peranan sektor-sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, maka diperlukan kebijakan Pemrov dan pemkab/kota terhadap pengembangan sektor-sektor tersebut. Maka untuk mengoptimalkan pembangunan masing-masing sektor diperlukan adanya infrastruktur (listrik, jalan, jembatan, dll), dan pengembangan industri hilir untuk meningkatkan *value added* (nilai tambah) serta menciptakan lapangan kerja sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

II. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA

Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan triwulan III 2007, terdapat 4 (empat) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar Rp.768,2 miliar, yang diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.414 orang. Sedangkan realisasi investasi PMDN berdasarkan izin usaha tetap, tercatat sebanyak 9 (sembilan) proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.3.095,3 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17.912 orang. (lihat tabel 1.8.)

Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMDN di Provinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	5,302.0	12	5,871	387.1	3	1,713
2002	1,606.1	8	7,438	0.0	0	0
2003	1,695.1	8	2,700	160.9	2	584
2004	3,469.4	12	5,707	86.1	2	703
2005	4,579.5	11	3,221	10,230.8	15	22,795
2006	20,898.2	6	3,006	2,501.0	10	13,486
2007 :						
Tw. I	124.4	1	268	1,867.8	3	11,823
Tw. II	181.8	2	1,092	346.2	3	1,775
Tw. III	462.0	1	54	881.3	3	4,314
Jumlah	768.2	4	1,414	3,095.3	9	17,912

Sumber : BPI Provinsi Riau

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota di provinsi Riau sampai dengan triwulan III-2007, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pelalawan sebesar Rp.123,7 miliar, Rokan Hilir sebesar Rp.115 miliar dan kota Dumai sebesar Rp.462 miliar, sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan/perubahan proyek terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kampar sebesar Rp. 25,2 miliar dan Pekanbaru sebesar Rp.1 miliar. Sementara yang mengalami alih status terdapat pada kabupaten Pelalawan dengan nilai investasi sebesar Rp.41,4 miliar. (lihat tabel 1.9)

Tabel 1.10. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007)

No.	Kabupaten/Kota	BARU			PERLUASAN/PERUBAHAN			ALIH STATUS			TOTAL				
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah	
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pelalawan	1	123.7	504	-	-	-	1	41.4	48	-	2	165.1	552	552
5	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kampar	-	-	-	2	25.2	347	-	-	-	-	-	25.2	347	347
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Rokan Hilir	1	115	207	-	-	-	-	-	-	-	1	115.0	207	207
10	Pekanbaru	-	-	-	1	1.0	254	-	-	-	-	-	1.0	254	254
11	Dumai	1	462	54	-	-	-	-	-	-	-	1	462.0	54	54
	JUMLAH	3	700.7	765	3	26.2	601	-	41.4	48	-	4	768.30	1,414	1,414

Sumber : BPI Provinsi Riau

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut sektor ekonomi, terdapat 2 (dua) sektor yang merupakan persetujuan investasi baru yaitu industri makanan dan industri kimia. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 3 (tiga) sektor yaitu peternakan, industri makanan dan jasa lainnya. Sementara sektor yang mengalami alih status terdapat pada sektor perkebunan. (lihat tabel 1.10)

Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007)

No.	Sektor	BARU			PERLUASAN/PERUBAHAN			ALIH STATUS			TOTAL						
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah			
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	1	41.4	48	-	1	41.4	48	48		
3	Peternakan	-	-	-	1	9.4	61	-	-	-	-	-	9.4	61	61		
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Industri Makanan	2	238.7	711	1	15.8	286	-	-	-	-	2	254.5	997	997		
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Industri Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Industri Kimia	1	462.0	54	-	-	-	-	-	-	-	1	462.0	54	54		
13	Ind. Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Ind. Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Listrik dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Hotel & Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Jasa Lainnya	-	-	-	1	1.0	254	-	-	-	-	-	1.0	254	254		
	JUMLAH	3	700.7	765	0	3	26.2	601	0	41.4	48	0	4	768.3	1,414	0	1,414

Sumber : BPI Provinsi Riau

Sementara itu, perkembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan triwulan III-2007, terdapat 15 (lima belas) proyek yang telah disetujui dengan nilai investasi sebesar US\$ 3.546,1 juta dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13.892 orang. Sedangkan realisasi investasi PMA terdapat 4 (empat) proyek yang telah direalisasikan dengan nilai investasi sebesar US\$ 460,6 juta yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.873 orang.

Meningkatnya realisasi investasi PMDN dan PMA sampai dengan triwulan III-2007 dibandingkan dengan tahun sebelumnya memberikan harapan positif bagi peningkatan kegiatan perekonomian di Riau pada tahun 2007. (lihat tabel 1.11)

Tabel 1.12. Perkembangan Nilai Investasi dan Realisasi PMA di Provinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	1,070.7	15	6,371	197.6	3	211
2002	34.2	7	1,644	1.6	2	131
2003	1,032.4	8	1,635	80.2	4	6,264
2004	214.9	10	18,232	514.3	8	4,900
2005	179.7	9	4,142	795.8	8	2,831
2006	1,788.5	30	11,935	314.6	8	12,793
2007 :						
Tw. I	2,013.1	6	10,942	392.4	1	254
Tw. II	130.3	4	685	11.4	2	178
Tw. III	1,402.7	5	2,265	56.8	1	1,441
Jumlah	3,546.1	15	13,892	460.6	4	1,873

Sumber : BPI Provinsi Riau

Perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota, terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pelalawan dengan nilai investasi sebesar US\$ 10 juta, Kampar sebesar US\$ 7,5 juta, Pekanbaru sebesar US\$ 1,7 juta dan Dumai sebesar US\$ 80,3 juta. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Pelalawan dengan nilai investasi sebesar US\$ 170,6 juta, Siak sebesar US\$ 1.715 juta, Bengkalis sebesar US\$ 67,31 juta dan Dumai sebesar US\$ 86,2 juta. Sementara investasi yang disetujui alih status terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir sebesar US\$ 71 juta dan Pekanbaru sebesar US\$ 1.336,5 juta. (lihat tabel 1.12)

Tabel.13. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA		
				TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA	Jumlah
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelalawan	1	10.0	100	-	1	170.6	158	-	-	-	-	1	180.6	258	-	258	-
5	Siak	-	-	-	-	3	1,715.0	6,150	-	-	-	-	-	1,715.0	6,150	-	6,150	-
6	Kampar	2	7.5	402	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.5	402	-	402	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	-	-	-	-	1	67.31	114	-	-	-	-	-	67.31	114	-	114	-
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71.0	4,389	-	1	71.0	4,389	-	4,389
10	Pekanbaru	3	1.7	46	-	-	-	-	-	3	1,336.5	2,166	-	6	1,338.2	2,212	-	2,212
11	Dumai	3	80.3	143	-	2	86.2	224	-	-	-	-	3	166.5	367	-	367	-
	JUMLAH	9	99.5	691	-	7	2,039.1	6,646	-	4	1,407.5	6,555	-	13	3,546.1	13,892	-	13,892

Sumber : BPI Provinsi Riau

Perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor ekonomi sampai dengan triwulan III-2007, terdapat 6 (enam) sektor yang merupakan persetujuan investasi baru yaitu perkebunan, industri makanan, industri kayu, industri kimia, perdagangan dan jasa lainnya. Sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan proyek terdapat pada 5 (lima) sektor yaitu industri makanan, industri kayu, industri kertas, industri kimia, serta listrik dan air minum. Sementara yang memperoleh persetujuan alih status terdapat pada 5 (lima) sektor yaitu perkebunan, industri makanan, industri kimia, perdagangan serta jasa lainnya. (lihat tabel 1.13)

Tabel 1.14. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Sektor di Provinsi Riau (S/D Triwulan III-2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA		Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA		
				TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan	-	0.3	100	-	-	-	-	-	1	65.3	3,960	-	1	65.6	4,060	-	4,060
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan	2	15.0	200	-	1	67.3	114	-	-	5.7	429	-	2	88.0	743	-	743
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	1	2.3	202	-	1	0.2	100	-	-	-	-	-	1	2.5	302	-	302
10	Industri Kertas	-	-	-	-	1	1,174.7	1,050	-	-	-	-	-	-	1,174.7	1,050	-	1,050
11	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Industri Kimia	2	77.0	113	-	3	767.9	5,362	-	1	1,311.1	2,100	-	3	2,156.0	7,575	-	7,575
13	Ind. Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ind. Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listrik dan Air	-	-	-	-	1	29.0	20	-	-	-	-	-	-	29.0	20	-	20
18	Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Perdagangan	2	4.2	55	-	-	-	-	-	2	23.9	53	-	4	28.1	108	-	108
20	Hotel & Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jasa Lainnya	2	0.8	21	-	-	-	-	-	2	1.5	13	-	4	2.3	34	-	34
	JUMLAH	9	99.5	691	-	7	2,039.1	6,646	-	6	1,407.5	6,555	-	15	3,546.1	13,892	-	13,892

Sumber : BPI Provinsi Riau

Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) menurut negara asal yang merupakan persetujuan investasi baru terbesar berasal dari India dengan nilai investasi sebesar US\$ 65 juta, sedangkan yang memperoleh persetujuan perluasan maupun alih status berasal dari negara Seychel dengan nilai investasi sebesar US\$ 170,6 juta dan US\$ 1.311,1 juta. (lihat tabel 1.14)

Tabel 1.14. Perkembangan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Surat Persetujuan Menurut Negara Asal di Provinsi Riau (S/D Triwulan III 2007)

No.	Negara Asal	BARU				PERLUASAN/PERUBAHAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI	TKA	Jumlah
1	Korea Selatan	1	2.5	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.5	302	-	302
2	Singapura	1	0.3	10	-	-	-	-	3	94.5	4,435	-	-	4	94.8	4,445	-	4,445
3	Malaysia	3	25.3	181	-	1	67.3	114	1	1.1	15	-	4	93.7	310	-	310	
4	India	1	65.0	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65.0	62	-	62	
5	Mauritus	-	-	-	1	57.2	204	-	-	-	-	-	-	57.2	204	-	204	
6	Seychel	-	-	-	1	170.6	158	-	1	1,311.1	2,100	-	1	1,481.7	2,258	-	2,258	
7	Inggris	-	-	-	1	29.0	20	-	1	0.7	5	-	1	29.7	25	-	25	
8	Gab. Negara	3	6.5	136	3	1,715.0	6,150	-	-	-	-	-	3	1,721.5	6,286	-	6,286	
	Jumlah	9	99.5	691	7	2,039.1	6,646	-	6	1,407.5	6,555	-	15	3,546.1	13,892	-	13,892	

Sumber : BPI Propinsi Riau

2.2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA

Dari seluruh propinsi di Indonesia realisasi investasi PMDN dan PMA di provinsi Riau sampai dengan November 2007 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, provinsi Riau menempati urutan ke 4, baik dalam realisasi investasi PMDN maupun PMA. Realisasi investasi PMDN mencapai Rp.3.095,3 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 11 proyek, sedangkan realisasi investasi PMA mencapai US\$.724 juta dengan jumlah proyek sebanyak 10 proyek (lihat tabel 1.15).

Melihat besarnya potensi ekonomi pada beberapa sektor seperti perkebunan, perikanan, industri, dan pertambangan, maka peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Riau pada tahun yang akan datang masih sangat terbuka. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan upaya perbaikan terutama dalam dan maupun penyediaan infrastruktur.

Tabel.1.15 Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Lokasi
Periode : Januari s/d. 30 November 2007

PMDN					PMA				
NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (Rp.Milyar)	%	NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (US\$.Juta)	%
1	JAWA BARAT	33	11,269.7	33.0	1	DKI JAKARTA	339	4,618.4	45.6
2	JAMBI	2	4,474.7	13.1	2	JAWA TIMUR	61	1,688.2	16.7
3	DKI JAKARTA	32	4,191.7	12.3	3	JAWA BARAT	235	1,302.0	12.9
4	RIAU	11	3,095.3	9.1	4	RIAU	10	724.0	7.1
5	SULAWESI TENGGARA	1	2,768.9	8.1	5	BANTEN	73	630.8	6.2
6	JAWA TIMUR	16	1,653.7	4.8	6	SUMATERA SELATAN	5	213.8	2.1
7	SUMATERA UTARA	6	1,521.3	4.5	7	SUMATERA UTARA	17	189.8	1.9
8	BANTEN	22	1,068.7	3.1	8	LAMPUNG	4	123.9	1.2
9	SUMATERA SELATAN	5	811.5	2.4	9	KALIMANTAN TIMUR	16	109.3	1.1
10	SULAWESI UTARA	1	624.0	1.8	10	JAWA TENGAH	40	100.7	1.0
11	SULAWESI TENGAH	2	487.6	1.4	11	KALIMANTAN TENGAH	3	77.6	0.8
12	KALIMANTAN TENGAH	2	447.0	1.3	12	SULAWESI SELATAN	8	62.8	0.6
13	KALIMANTAN TIMUR	3	440.0	1.3	13	KALIMANTAN SELATAN	6	59.8	0.6
14	BANGKA BELITUNG	1	313.7	0.9	14	SUMATERA BARAT	4	56.7	0.6
15	KALIMANTAN BARAT	2	287.0	0.8	15	KEPULAUAN RIAU	28	52.8	0.5
16	JAWA TENGAH	3	273.0	0.8	16	BALI	70	49.7	0.5
17	LAMPUNG	1	130.1	0.4	17	N. ACEH DARUSSALAM	2	17.4	0.2
18	KALIMANTAN SELATAN	2	102.7	0.3	18	JAMBI	1	15.6	0.2
19	KEPULAUAN RIAU	2	97.1	0.3	19	KALIMANTAN BARAT	2	11.2	0.1
20	D.I YOGYAKARTA	-	33.1	0.1	20	SULAWESI UTARA	1	9.7	0.1
21	BALI	1	15.2	0.0	21	SULAWESI TENGAH	-	7.1	0.1
22	SULAWESI SELATAN	-	1.1	0.0	22	NUSA TENGGARA BARAT	5	5.9	0.1
23	N. ACEH DARUSSALAM	-	-	0.0	23	PAPUA	2	2.5	0.0
24	SUMATERA BARAT	-	-	0.0	24	D.I YOGYAKARTA	4	1.5	0.0
25	BENGKULU	-	-	0.0	25	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0.4	0.0
26	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	0.0	26	BENGKULU	-	-	0.0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0.0	27	BANGKA BELITUNG	-	-	0.0
28	GORONTALO	-	-	0.0	28	SULAWESI TENGGARA	-	-	0.0
29	MALUKU	-	-	0.0	29	GORONTALO	-	-	0.0
30	MALUKU UTARA	-	-	0.0	30	MALUKU	-	-	0.0
31	PAPUA	-	-	0.0	31	MALUKU UTARA	-	-	0.0
J U M L A H		148	34,107.1	100.0	J U M L A H		937	10,131.6	100.0

Sumber : Website BKPM

III. Perkembangan Ekspor-Impor Non Migas

Pengaruh harga minyak di pasaran dunia tampaknya tidak membawa dampak yang mengkhawatirkan terhadap kinerja perdagangan luar negeri non migas Provinsi Riau. Hal ini tercermin dengan meningkatnya surplus kinerja perdagangan luar negeri pada periode Januari s.d. November 2007 sebesar USD 3.428,31 juta atau lebih tinggi 17,60% dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD2.915,13 juta. Nilai ekspor non migas pada triwulan laporan meningkat sebesar USD 1.105,38 juta atau 28,61 % dari USD 3.863,48 juta menjadi USD 4.968,86 juta. Disisi lain nilai impor non migas juga mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar USD 592,20 juta (62,45%) dari USD 948,35 juta menjadi USD 1.540,55 juta.

Tabel 1.17. Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Riau
Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

	Jan - Nov. 2006	Jan - Nov. 2006	Δ	% Δ
Ekspor	3,863.48	4,968.86	1,105	28.61
Impor	948.35	1,540.55	592	62.45
Net Ekspor	2,915.13	3,428.31	513.18	17.60

1. Ekspor Non Migas

Nilai ekspor non migas Provinsi Riau periode Januari s.d. November 2007 tercatat sebesar USD 4.968,86 juta atau meningkat USD1.105,38 juta (28,61%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat dunia terhadap beberapa komoditas utama provinsi Riau seperti minyak dan lemak nabati (CPO), kertas (Kertas, kertas karton dan olahannya), Olahan Minyak dan lemak Nabati dan Hewani, Batubara, kokas dan Briket, serta sayur dan buah .

Tabel 1.18. Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Periode Januari s.d. November 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

No	Kelompok	Jan-Nov. 2006	%	Jan-Nov. 2007	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	2,179.90	56.42	2,980.24	59.98	36.71
2	Pulp dan Kertas	790.76	20.47	608.14	12.24	-23.09
3	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	550.28	14.24	761.67	15.33	38.42
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	80.69	2.09	312.65	6.29	287.47
5	Buah dan Sayuran	53.87	1.39	57.32	1.15	6.40
6	Batu bara, kokas & brikets	46.81	1.21	71.35	1.44	52.41
7	Lainnya	161.17	4.17	177.50	3.57	10.13
Total		3,863.48	100.00	4,968.86	100.00	28.61

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Ekspor kelompok minyak dan lemak nabati tercatat sebesar USD2.980,24 juta atau meningkat 36,71 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor komoditi ini masih mendominasi pangsa ekspor di Provinsi Riau yaitu 59,98% dari total ekspor non migas. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi ini dipasaran internasional sebagai akibat dari tingginya permintaan dunia terhadap minyak dan lemak nabati serta didukung oleh peningkatan kinerja industri

untuk memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu, ekspor olahan minyak dan lemak Nabati dan Hewani meningkat sebesar USD 312,65 juta atau 287,47%. Jenis olahan minyak dan lemak nabati hewani terbesar yaitu minyak dan lemak nabati/hewani, cuka olahan dan minyak cuka hasil penyulingan.

Ekspor kelompok kertas, kertas karton dan olahannya tercatat sebesar USD 761,67 juta atau 15,33% dari total ekspor dan meningkat 38,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan ekspor pulp dan kertas tercatat sebesar USD 608,14 juta atau mengalami penurunan 23,09%. Mengingat kedua komoditas tersebut berada pada industri yang sama, maka kondisi di atas mencerminkan adanya pergeseran untuk menciptakan komoditi ekspor yang semula berbentuk barang setengah jadi/mentah menjadi barang jadi, sehingga proses penciptaan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditi ekspor unggulan di Riau dapat semakin optimal, dan merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah di masa mendatang. Secara total ekspor kedua kelompok tersebut meningkat sebesar 2,15% dari USD1.341,04 juta menjadi USD 1.369,81 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa isue ilegal logging yang marak selama tahun 2007 belum memberikan dampak negatif terhadap ekspor komoditi terkait.

Komoditi ekspor non migas lainnya yaitu batubara, kokas dan briket sampai dengan periode laporan tercatat sebesar USD71,35 juta meningkat 52,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 46,81 juta. Peningkatan ini selain disebabkan tingginya permintaan dunia juga didorong oleh peningkatan eksplorasi dan eksploitasi komoditas batu bara di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

Ekspor kelompok buah dan sayuran juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah ekspor tercatat sebesar USD 57,32 juta meningkat sebesar 6,40%. Ekspor buah dan sayur yang terbesar yaitu ekspor kelapa yang pada periode laporan tercatat sebesar USD 46 juta dengan negara tujuan ekspor adalah Singapura.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor Propinsi Riau terbesar ke Singapore yaitu mencapai USD 2.821,18 juta atau 56,78% dari total nilai ekspor, diikuti Hongkong sebesar USD 673,50 juta (13,55%) dan Malaysia sebesar USD 315,29 juta (6,35%).

Tabel 1.19. Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli
Periode Januari - November 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Jan-Nov. 2006	%	Jan-Nov. 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapore	1,820.28	47.11	2,821.18	56.78	1,000.90	54.99
2	Hongkong	438.51	11.35	673.50	13.55	234.99	53.59
3	Malaysia	206.20	5.34	315.29	6.35	109.09	52.90
4	RRC	718.48	18.60	223.19	4.49	-495.29	-68.94
5	MEE	77.95	2.02	90.11	1.81	12.16	15.60
6	Francis	22.38	0.58	28.61	0.58	6.23	27.85
7	Lainnya	579.68	15.00	816.99	16.44	237.31	40.94
Total		3,863.48	100.00	4,968.86	100.00	1105.38	28.61

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

2. Impor Non Migas

Kegiatan Impor non migas provinsi Riau pada periode laporan meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 948.35 juta menjadi USD 1.540.55 juta atau meningkat sebesar 62,45%. Peningkatan ini terutama terjadi pada barang modal dan bahan baku penolong sehingga memberikan indikasi positif bagi perekonomian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan produktif khususnya di sektor industri.

Nilai impor barang modal seperti mesin industri tertentu mencapai USD569,22 Juta atau meningkat 56,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mesin industri dan perlengkapannya tercatat sebesar USD 204 juta atau meningkat 57,66% dan mesin pembangkit tenaga tercatat 106,84 juta atau meningkat 198,62%. Sementara itu, impor bahan baku penolong seperti pupuk kimia buatan pabrik tercatat sebesar USD 93,82 juta atau meningkat 40,15%, pulp dan kertas sebesar USD 96,12 juta atau meningkat 270,56%, serta besi dan baja sebesar USD 86,36 juta atau meningkat 205,05%. Meningkatnya impor besi dan baja diperkirakan terkait dengan realisasi proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung.

Tabel 1.20. Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)

No	Komoditas	Jan-Nov. 2006	%	Jan-Nov. 2007	%	Kenaikan (%)
1	Mesin Industri Tertentu	363.74	38.36	569.22	36.95	56.49
2	Mesin Industri dan Perlengkapannya	129.39	13.64	204.00	13.24	57.66
3	Mesin Pembangkit tenaga	35.78	3.77	106.84	6.94	198.62
4	Pupuk Kimia buatan Pabrik	66.94	7.06	93.82	6.09	40.15
5	Pulp dan Kertas	25.94	2.74	96.12	6.24	270.56
6	Besi dan Baja	28.31	2.99	86.36	5.61	205.05
7	Lainnya	298.24	31.45	384.18	24.94	28.81
Total		948.35	100.00	1,540.55	100.00	62.45

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Impor Provinsi Riau sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia, yaitu Singapura dengan nilai impor mencapai USD 555,19 juta atau 36,04% dari total impor, diikuti Hongkong sebesar USD 296,78 juta (19,26%), Australia sebesar USD 187,95 juta (12,20%). Sedangkan sisanya tersebar di negara lainnya di benua Afrika, Amerika dan Eropa.

Tabel 1.21. Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau
Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Jan-Nov. 2006	%	Jan-Nov. 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapura	507.13	53.48	555.19	36.04	48.06	9.48
2	Australia	70.85	7.47	187.95	12.20	117.09	165.26
3	Hongkong	140.30	14.79	296.78	19.26	156.48	111.53
4	Malaysia	81.16	8.56	98.83	6.42	17.67	21.77
5	Amerika Selatan	0.61	0.06	54.00	3.51	53.39	8746.75
6	Africa	3.19	0.34	47.97	3.11	44.78	1405.45
7	Lainnya	145.11	15.30	299.83	19.46	154.72	106.63
Total		948.35	100.00	1,540.55	100.00	592.20	62.45

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran

Berdasarkan jenis valuta yang diperoleh dari kegiatan ekspor non migas, valuta USD merupakan yang terbesar yaitu sebesar USD 4.876,04 juta atau 98,13%. Tingginya penerimaan dalam valuta USD diperkirakan karena mata uang dimaksud bersifat *hard currencies*, atau dapat digunakan hampir diseluruh negara. Kehadiran mata uang

lainnya seperti IDR, EUR, SGD, MYR, CAD, dan GBP mengakomodir kebutuhan transaksi ekspor dari negara masing-masing.

Tabel.1.22. Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. November 2006 dan 2007(dalam juta USD)

No.	Valuta	Jan-Nov. 2006	Jan-Nov. 2007	No.	Cara Pembayaran	Jan-Nov. 2006	Jan-Nov. 2007
1	USD	3,810.99	4,876.04	1	Lainnya	1,821.48	2,607.83
2	IDR	26.05	46.19	2	Perhitungan Kemudian	982.96	1,028.99
3	EUR	10.47	30.95	3	Wesel Inkaso	617.37	828.05
4	SGD	6.18	4.54	4	Sight L/C	391.56	379.17
5	MYR	4.18	4.17	5	Pembayaran dimuka	49.92	90.12
6	CAD	4.18	1.59	6	Konsinyasi	0.09	0.13
7	GBP	1.40	3.67	7	Usance L/C	0.10	34.56
8	Lainnya	0.02	1.72				
		3,863.48	4,968.86			3,863.48	4,968.86

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Untuk pembayaran ekspor non migas lebih banyak digunakan cara Perhitungan Kemudian, yaitu mencapai USD 1.028,99 juta (20,71%). Cara pembayaran seperti ini lazimnya diterima oleh perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri. Cara pembayaran lainnya adalah Wesel Inkaso sebesar USD828,05 juta (16,66%), *Sight L/C* sebesar USD 379,17 juta (7,63%), pembayaran dimuka sebesar USD 90,12 juta (1,81%), Konsinyasi sebesar USD 0,13 juta, *Usance L/C* sebesar USD34,56 juta (0,70%) dan lainnya USD 2.607,83 juta(52,48%).

Tabel.1.23. Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. November 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No.	Valuta	Jan-Nov. 2006	Jan-Nov. 2007	No.	Cara Pembayaran	Jan-Nov. 2006	Jan-Nov. 2007
1	USD	902.37	1,474.75	1	Non L/C	881.14	1,453.69
2	EUR	20.84	27.03	2	L/C	67.20	86.85
3	MYR	9.72	24.51				
4	SGD	14.10	13.93				
5	JPY	1.25	0.07				
6	Lainnya	0.06	0.25				
		948.35	1,540.55			948.35	1,540.55

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kebutuhan valuta asing dalam rangka impor non migas propinsi Riau terbesar dalam USD yaitu sebesar USD 1.474,75 juta (95,73%). Sedangkan cara pembayaran untuk impor non migas pada periode yang sama adalah *Non L/C* yaitu sebesar USD 1.453,69 juta (94,36%) dan *L/C* hanya sebesar USD 86,85 juta (5,64%). Banyaknya penggunaan cara pembayaran *Non L/C* ini merefleksikan adanya dasar saling percaya dalam transaksi perdagangan internasional disamping praktis dan efisien.

IV. Keuangan Daerah

1. Kondisi Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2007. Anggaran pendapatan menurun sebesar Rp.0,2 triliun atau 5,54% menjadi Rp.3,46 triliun, sedangkan anggaran belanja naik sebesar Rp.0,17 triliun atau 4,89% menjadi Rp.4,36 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat defisit anggaran sebesar Rp.0,90 triliun yang dibiayai dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya.

2. APBD Provinsi Riau Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2008 mengalami penurunan dari Rp.3,65 triliun menjadi Rp.3,46 triliun, atau menurun sebesar Rp.0,2 triliun (5,54%). Penurunan terjadi pada semua komponen, pendapatan asli daerah (PAD) menurun sebesar 5,02% menjadi Rp.1,09 triliun, dana perimbangan menurun 9,96% menjadi Rp.2,37 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah dari Rp.20 miliar pada anggaran tahun 2007 menjadi Rp.0 pada anggaran tahun 2008. Sementara itu, Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 4,08% menjadi Rp.3,46 triliun.

Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, sehingga APBD Provinsi Riau tahun 2008 mengalami defisit sebesar Rp.895,41 miliar, meningkat 71,70% dibandingkan APBD tahun 2007 yang tercatat sebesar Rp.521,50 miliar. Defisit yang terjadi pada APBD tahun 2008 dibiayai dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya yang pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp.1,03 triliun, meningkat 29,36% dibandingkan dengan sisa anggaran tahun 2006.

Tabel 1.24. Ringkasan APBD Provinsi Riau Tahun 2008

No.	Uraian	APBD 2007	APBD 2008
I	PENDAPATAN DAERAH	3.646.197	3.463.095
	Pendapatan Asli daerah	990.224	1.089.591
	Dana Perimbangan	2.635.973	2.373.504
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.666.197	3.463.095
II	BELANJA DAERAH	4.187.692	4.358.508
	SURPLUS/(DEFISIT)	(521.495)	(895.413)

sumber : Biro Keuangan

3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau

Total Dana Alokasi Umum Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2008 mencapai Rp.2.309 Miliar. Dana Alokasi Umum paling tinggi diberikan kepada Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai Rp.390 miliar, diikuti Kota pekanbaru sebesar Rp.344 miliar, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp.251 miliar. Sementara DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Rokan Hilir yang tercatat sebesar Rp.22,96 miliar.

Tabel 1.25. Ringkasan Dana Alokasi Umum Provinsi Riau Tahun 2008 (Ribu Rupiah)

No.	Wilayah	DAU	DP DAU	Total
1	Provinsi Riau	198.375.199		198.375.199
2	Kab. Bengkalis		51.680.750	51.680.750
3	Kab. Indragiri Hilir	389.699.955		389.699.955
4	Kab. Indragiri Hulu	250.954.258		250.954.258
5	Kab. Kampar	244.763.763		244.763.763
6	Kab. Kuantan Singingi	291.388.945		291.388.945
7	Kab. Pelalawan	195.626.393		195.626.393
8	Kab. Rokan Hilir		22.962.000	22.962.000
9	Kab. Rokan Hulu	201.064.732		201.064.732
10	Kab. Siak		23.902.250	23.902.250
11	Kota Dumai	94.441.796		94.441.796
12	Kota Pekanbaru	344.111.454		344.111.454
	Jumlah	2.210.426.495	98.545.000	2.308.971.495

sumber : www.sikd.djapk.go.id

Di sisi lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/kota pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp.193 miliar. Dana Alokasi Khusus terbesar pada tahun 2008 diperoleh Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi yang tercatat sebesar Rp.40,7 triliun, diikuti Rokan Hilir sebesar Rp.39,97 triliun. Dana Alokasi Khusus terendah diperoleh Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp.8,03 miliar

Tabel 1.26. Ringkasan Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau Tahun 2008
(Miliar Rupiah)

Bidang	Riau	Bengkalis	InHil	InHu	Kampar	Kuansing	Pelalawan	Rohil	Rohul	Siak	Dumai	Pekanbaru
Pendidikan	-	2,407	2,663	2,427	2,431	14,74	2,234	11,224	14,122	2,173	2,241	2,335
Kesehatan	-	1,951	2,134	1,992	2,026	7,197	1,833	8,924	6,784	1,755	1,773	1,814
Kependudukan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Jalan	-	2,786	2,271	2,142	2,428	7,38	1,632	7,758	6,814	1,528	1,795	1,86
Irigasi	-	0,436	0,587	0,607	0,519	1,638	0,613	2,275	2,99	0,378	0,439	0
Air Bersih	-	0,604	0,667	0,641	0,66	3,089	0,58	2,419	2,331	0,547	0,569	0,559
Perikanan	-	0,603	0,647	0,562	0,631	1,148	0,544	2,254	1,338	0,524	0,548	0,564
Pertanian	-	0,924	1,409	1,132	1,236	3,241	0,877	3,971	3,249	0,696	0,723	0,742
Prasarana	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lingkungan Hidup	-	0,188	0,226	0,187	0,222	0,805	0,177	1,144	0,946	0,148	0,132	0,155
Kehutanan	-	0	0	0	0	0,687	0	0	0,696	0	0	0
Total	-	9,899	10,604	9,69	10,153	40,696	8,49	39,969	39,927	7,749	8,22	8,029

sumber : www.sikd.djapk.go.id

Dalam triwulanan laporan, inflasi secara bulanan menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Pada bulan Oktober, Nopember dan Desember terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,81%, 0,85%, dan 1,61%. Inflasi yang terjadi pada bulan Oktober didominasi oleh peningkatan pada kelompok sandang yaitu sepatu, emas perhiasan, sepatu, dan kerudung/jilbab. Sementara itu, inflasi pada bulan Nopember didominasi oleh kelompok sandang dan makanan jadi (makanan jadi, minuman, rokok & tembakau) yaitu emas perhiasan, donat, dan rokok kretek filter. Selanjutnya, inflasi pada bulan Desember didominasi oleh peningkatan pada kelompok bahan makanan yaitu bawang merah, beras, tongkol, dan serai. Hal ini seiring dengan adanya perayaan Hari Natal dan menyambut Tahun Baru.

Tabel 2.1. Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan IV Tahun 2007

NO	KELOMPOK	Oktober		Nopember		Desember		Tw IV 07	
		Inflasi (%)	Andil (%)						
1.	Bahan Makanan	1,29	0,38	0,60	0,18	3,32	0,98	5,28	1,54
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,13	0,02	2,13	0,38	1,05	0,19	3,34	0,59
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0,02	0,00	0,20	0,04	0,76	0,17	0,94	0,22
4.	Sandang	4,35	0,39	2,58	0,24	1,64	0,15	8,80	0,78
5.	Kesehatan	0,12	0,00	0,11	0,00	1,13	0,04	1,36	0,05
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,01	0,00	0,34	0,02	1,35	0,06	1,71	0,08
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,19	0,02	0,00	0,00	0,20	0,03	0,39	0,05
	UMUM	0,81	0,81	0,85	0,85	1,61	1,61	3,31	3,31

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka selama triwulan IV–2007 terjadi inflasi pada semua kelompok barang dan jasa. Kelompok sandang tercatat mengalami inflasi tertinggi yang mencapai 8,80%, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 5,28%, sementara kelompok transpor (transpor, komunikasi dan jasa keuangan) tercatat mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,39%. Tingginya tingkat inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh adanya 2 perayaan keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal juga menjelang Tahun Baru, disamping didorong juga oleh kenaikan harga beberapa bahan bangunan karena peningkatan permintaan, yang

tercermin dari meningkatnya harga pada komoditas bawang merah (96,28%), semen (55,03%), donat (50%), paku (41,18%), dan tomat sayur (32,55%).

Meningkatnya kebutuhan semen dalam beberapa bulan terakhir dan terganggunya distribusi semen karena adanya kemacetan dalam pemuatan barang dari PT. Semen Padang (pemasok utama ke Riau) kepada agen dan distributor menjadi salah satu pemicu meningkatnya harga semen di Riau. Kenaikan yang terus-menerus berakibat pula pada peningkatan harga beberapa komoditas bangunan lainnya. Peningkatan kebutuhan semen didorong pula oleh adanya realisasi proyek fisik di Provinsi Riau yang pada akhir tahun rata-rata memasuki tahap *finishing*. Kenaikan pada komoditas bangunan tentunya akan memberatkan proyek pembangunan dan mengakibatkan terkendalanya proyek-proyek kecil dan menengah serta bangunan masyarakat. Keadaan ini pada akhirnya akan meningkatkan harga jual bangunan di Riau. Namun di sisi lain, terkendalanya pembangunan beberapa proyek akan berdampak pada penurunan yang signifikan pada penjualan beberapa bahan bangunan lainnya.

Dilihat dari kontribusi terhadap pembentukan inflasi kota Pekanbaru, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar yang mencapai 1,54%, lalu diikuti oleh kelompok sandang dan kelompok makanan jadi (makanan jadi, minuman, rokok & tembakau) yang masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 0,59%.

Secara nasional, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar adalah beras (0,52%), minyak goreng (0,49%), bawang merah (0,47%), emas perhiasan (0,33%), kontrak rumah (0,30%), dan rokok kretek filter (0,24%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga emas, bawang merah, beras, rokok kretek filter bukan hanya menjadi permasalahan di Riau, tapi juga menjadi permasalahan nasional.

Selain perayaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan Tahun Baru, bencana gempa yang terjadi di Bengkulu dan Sumatera Barat pada bulan September masih tetap menjadi pendorong tingginya kontribusi bahan makanan terhadap inflasi kota Pekanbaru. Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya distribusi/pasokan barang dan spekulasi pasar yang berakibat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas yang berasal dari daerah tersebut.

Sementara itu, sepuluh komoditi yang mengalami laju inflasi tertinggi adalah bawang merah, semen, donat, paku, tomat sayur, tempat tidur, besi beton, bubur kacang hijau, tahu mentah dan tenggiri. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan inflasi, maka komoditas bawang merah, emas perhiasan, beras, donat, tongkol, nasi, rokok kretek filter, tomat sayur, serai, dan cabe merah memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan inflasi di kota Pekanbaru.

Tabel 2.2. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan IV Tahun 2007

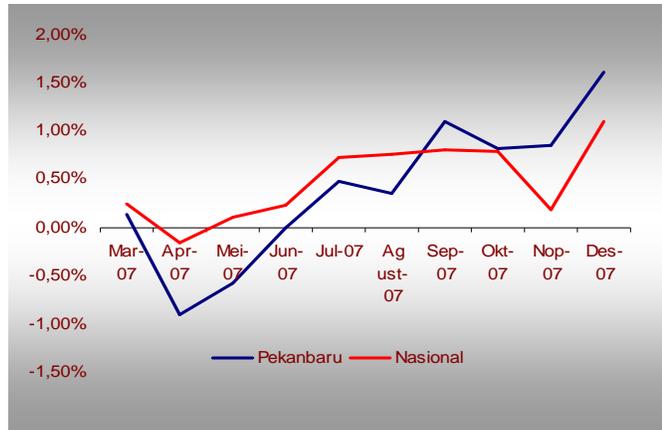
Triwulan IV 2007					
No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Bawang Merah	96,28	1	Bawang Merah	0,96
2	Semen	55,03	2	Emas Perhiasan	0,85
3	Donat	50,00	3	Beras	0,40
4	Paku	41,18	4	Donat	0,17
5	Tomat Sayur	32,55	5	Tongkol	0,13
6	Tempat Tidur	31,11	6	Nasi	0,13
7	Besi Beton	29,04	7	Rokok Kretek Filter	0,12
8	Bubur Kacang Hijau	25,00	8	Tomat Sayur	0,11
9	Tahu Mentah	25,00	9	Serai	0,10
10	Tenggiri	23,42	10	Cabe Merah	0,09

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Dari grafik 2.2. terlihat bahwa sejak Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 inflasi kota Pekanbaru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, Namun sejak September 2007 inflasi kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional (m-t-m). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga di Pekanbaru cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan harga di daerah lain. Secara tahunan (y-o-y) inflasi kota Pekanbaru juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,59% sementara inflasi kota pekanbaru sebesar 7,53%.

Tingginya tingkat inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan laporan dibandingkan dengan inflasi nasional didorong oleh bencana yang terjadi selama tahun 2007 di beberapa daerah pemasok utama Riau. Bencana yang terjadi telah mengganggu kelancaran distribusi barang ke Riau, sehingga harga barang di Riau menjadi meningkat.

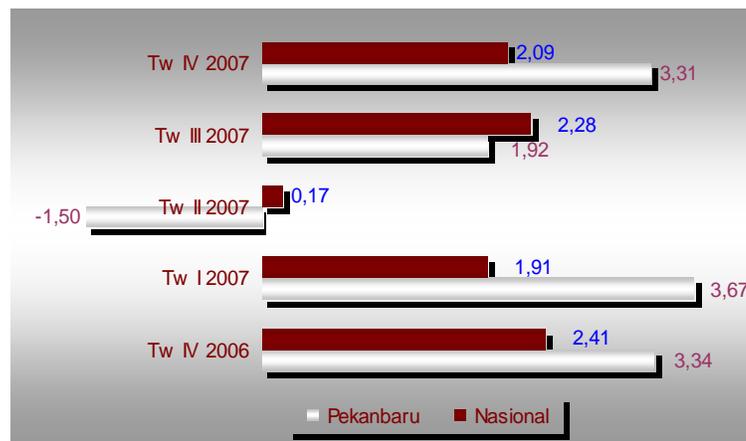
Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Penyumbang utama inflasi nasional pada bulan Oktober adalah emas perhiasan (0,07%), bawang merah dan kelapa (0,06%), ikan segar dan angkutan antar kota (0,05%). Pada bulan Nopember, komoditas yang menjadi penyumbang utama adalah bawang merah (0,14%), emas perhiasan (0,09%), tomat sayur (0,05%), sawi hijau (0,03%), beras dan minyak (0,02%). Sementara itu, pada bulan Desember komoditas bawang merah (0,26%), beras (0,18%), ikan segar (0,08%), minyak tanah (0,05%), rokok kretek filter (0,04%) dan minyak goreng (0,03%) memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi.

Grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional



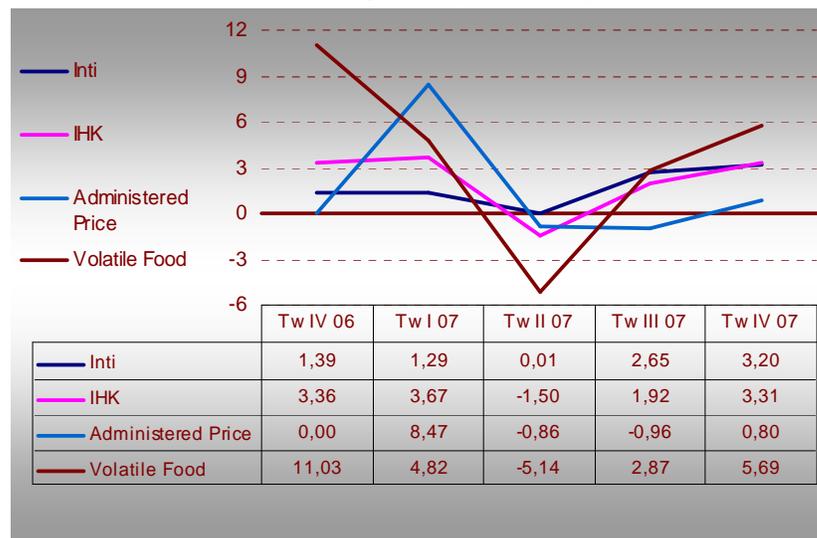
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Laju inflasi nasional pada triwulan laporan mencapai 2,09% (q-t-q) juga lebih rendah dari inflasi Pekanbaru, sama halnya dengan triwulan-triwulan sebelumnya laju inflasi kota Pekanbaru lebih tinggi dari inflasi nasional. Laju inflasi nasional dan kota Pekanbaru secara triwulanan ditunjukkan oleh grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.

3. PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN INFLASI DI KOTA PEKANBARU

Pada triwulan laporan, perkembangan inflasi inti menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tingginya permintaan barang dan jasa menjelang akhir tahun, sementara penawaran relatif terbatas menjadi penyebab meningkatnya inflasi inti (*core inflation*) pada triwulan laporan menjadi sebesar 3,20%, dan memberikan andil sebesar 1,71% terhadap pembentukan inflasi. Barang dan jasa komponen inflasi inti yang mengalami inflasi antara lain adalah semen (55,03%), donat (50%), paku (41,18%), besi beton (29,04%), dan emas perhiasan (20,84%).

Grafik 2.4. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi

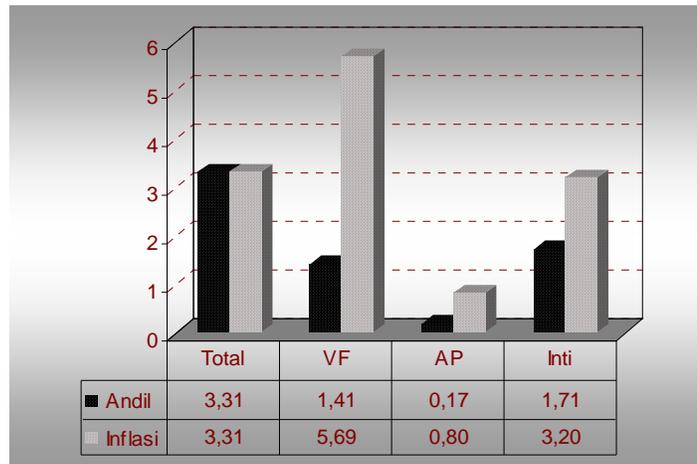


Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Sementara itu, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, meningkatkan laju inflasi pada komponen *volatile foods* dari 2,87% menjadi 5,69% dan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 1,41%. Tingginya permintaan akan barang dan jasa pada hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan menjelang tahun Baru menjadi penyebab utama peningkatan inflasi *volatile foods* pada triwulan IV-2007. Komoditas pada beberapa komponen *volatile food* mengalami peningkatan yang signifikan. Barang dan jasa komponen *volatile food* yang mengalami inflasi antara lain bawang merah, tomat sayur, tahu mentah dan beras.

Inflasi pada kelompok *administered price* mengalami peningkatan, pada triwulan laporan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,17%. Barang dan komponen *administired price* yang mengalami inflasi adalah rokok kretek filter sebesar 3,20%, dengan andil terhadap pembentukan inflasi sebesar 0,12%.

Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan IV-2007



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit terkonsentrasi pada sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yang mencapai 21,55% dari total kredit atau mencapai Rp.3.375 miliar. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.078 miliar (61,59%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh peningkatan aktivitas ekonomi di Riau. Perkembangan kredit yang menggembirakan pada sektor perdagangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang menargetkan Provinsi Riau sebagai pusat perdagangan pada tahun 2020.

Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp.3.139 miliar atau mencapai 20,04% dari total kredit. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.713 miliar (86,43%) merupakan kredit kepada subsektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada subsektor perkebunan terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau 27% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 5,54 juta hektar.

Di sisi lain, subsektor peternakan terus menunjukkan peningkatan sejak triwulan IV-2006. Pada triwulan laporan, kredit kepada subsektor peternakan mencapai Rp.4,63 miliar, meningkat Rp.673 juta atau 17,02% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan adanya pengembangan peternakan seperti sapi dan kambing yang akhir-akhir ini gencar dilaksanakan di Provinsi Riau antara lain melalui program K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur)

Sementara itu, kredit kepada sektor industri tercatat sebesar Rp.1.696 miliar atau 10,83%, dan kredit kepada sektor lain-lain tercatat sebesar Rp. 5.158 miliar atau 32,94% dari total kredit. Kredit di sektor lain-lain tersebut termasuk kredit perumahan yang tercatat Rp.2.100 miliar. Kredit kepada sektor jasa mencapai Rp.1.134 miliar atau 7,24% dari total kredit dan kredit sektor konstruksi tercatat sebesar Rp.740 miliar atau 4,73% dari total kredit. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan perkembangan sektor properti di Provinsi Riau, sehingga ditengarai banyak *developer* yang menggunakan *self financing* untuk membiayai proyeknya.

Tabel 3.5. Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pertanian	3.506.808	3.466.878	3.253.308	3.125.330	3.138.579
2	Pertambangan	1.151	1.305	20.129	53.557	62.370
3	Perindustrian	1.745.304	1.740.767	1.727.481	1.641.003	1.695.759
4	Listrik, Gas dan Air	310	305	443	6.427	7.660
5	Konstruksi	519.098	504.644	563.100	737.319	740.302
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.717.918	2.771.654	3.042.450	3.256.886	3.374.660
7	Pengangkutan, Pergud.	241.721	216.115	228.580	322.346	348.940
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	852.304	889.009	959.879	986.694	1.016.445
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	131.181	129.868	120.332	117.785	117.523
10	Lain-lain	4.139.046	4.281.890	4.652.509	5.008.474	5.157.738

*) data sampai dengan Nopember 2007

Dilihat dari penyebaran kredit di kota/kabupaten, kredit yang disalurkan oleh perbankan masih terkonsentrasi di kota Pekanbaru. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di kota ini sampai akhir periode laporan tercatat sebesar Rp.11.420 miliar (72,92%). Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi, sehingga disamping berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat bisnis utama baik perbankan maupun non perbankan yang tumbuh cukup pesat di era otonomi daerah.

Besarnya potensi ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau juga terlihat dari lebih besarnya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek. Jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar Rp.25.161 miliar, meningkat 17,69% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank pada semua kota/kabupaten. Kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mengalami peningkatan pada semua kota/kabupaten, kecuali Indragiri Hulu. Peningkatan tertinggi terdapat di Kota Dumai yang mencapai 47,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,25%, diikuti kabupaten Bengkalis sebesar 45,28%, juga meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 22,96%. Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan sebesar 10,22%, menjadi Rp.1.130 milyar.

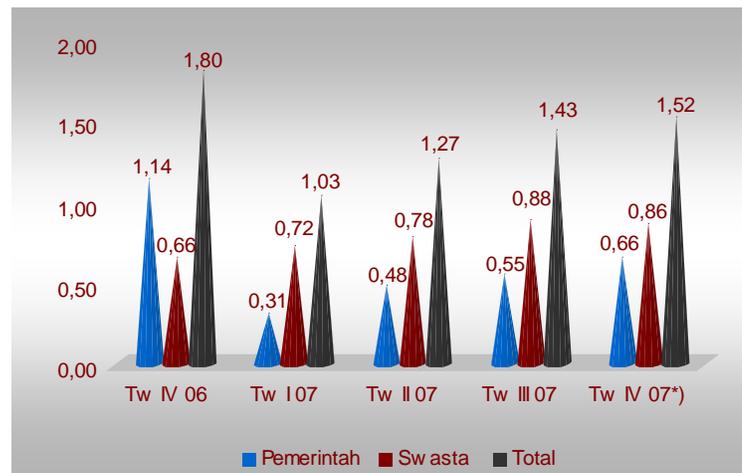
Tabel 3.6. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)

No	Kab./Kota	Lokasi Bank			Lokasi Proyek di Riau		
		Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pekanbaru	10.737.120	11.084.192	11.419.527	11.403.294	11.990.500	12.424.040
2	Bengkalis	421.201	428.530	453.398	1.366.591	1.680.422	2.441.357
3	Dumai	609.053	695.663	689.986	822.670	997.475	1.472.266
4	Indragiri Hilir	742.532	769.665	776.901	1.237.341	1.272.400	1.286.039
5	Indragiri Hulu	653.873	718.859	724.928	1.791.158	1.608.145	1.130.483
6	Lainnya	1.404.432	1.558.912	1.595.236	5.413.438	3.829.331	6.406.590
Jumlah		14.568.211	15.255.821	15.659.976	22.034.492	21.378.273	25.160.775

*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dari Rp.1.433 miliar menjadi Rp.1.520 miliar atau meningkat sebesar 6,07%. Dari jumlah tersebut, sebesar 56,82% tercatat pada kelompok bank swasta, namun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (2,42%), sedangkan 43,18% terdapat pada kelompok bank pemerintah, yang mengalami peningkatan sebesar 19,78%.

Grafik 3.4. Jumlah *Undisbursed Loan* Perbankan Provinsi Riau (triliun rupiah)

*) data sampai dengan Nopember 2007

Berdasarkan jenis penggunaan, 93,40% dari total kredit yang belum ditarik merupakan kredit modal kerja, sementara kredit investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 5,88% dan 0,72% dari total kredit yang belum ditarik. Sementara itu,

berdasarkan sektor ekonomi 38,68% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit kepada sektor perdagangan. Sektor lain yang juga mempunyai kelonggaran tarik cukup besar adalah sektor pertanian, jasa, industri, dan konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar 21,06%, 13,49%, 11,03%, dan 10,96% dari total kredit yang belum ditarik.

Tingginya Undisbursed Loan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya pembiayaan di luar perbankan, (*self financing* dan lembaga keuangan lainnya), suku bunga kredit yang masih relatif tinggi, kegiatan/proyek yang direncanakan belum berjalan sesuai rencana seperti *replanting* di sektor perkebunan.

Persetujuan kredit sampai dengan triwulan laporan telah mencapai Rp.1.434 miliar, yang didominasi oleh kredit konsumsi yaitu 39,99% dari total kredit, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara pangsa untuk kredit modal kerja dan Investasi mengalami penurunan yang masing-masing tercatat sebesar 38,62% dan 21,38%.

Tabel 3.7. Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau

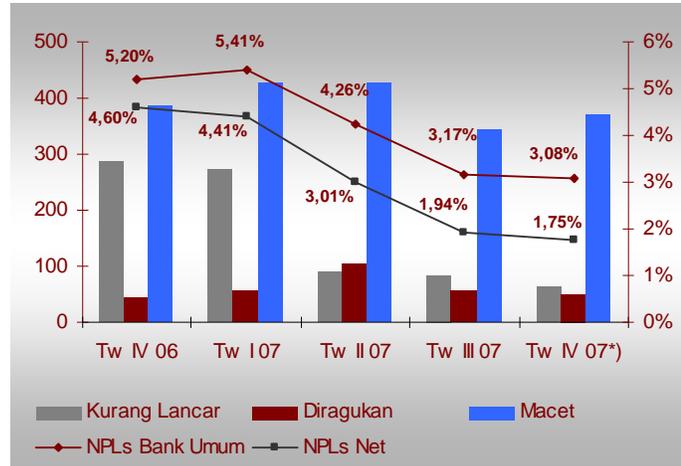
Jenis Penggunaan	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
	Rp. Juta	%								
1. Modal Kerja	819.377	47,12	615.992	33,56	731.207	35,13	908.572	38,73	554.065	38,62
2. Investasi	356.390	20,50	422.917	23,04	465.041	22,34	511.133	21,79	306.748	21,38
3. Konsumsi	563.047	32,38	796.350	43,39	885.329	42,53	926.060	39,48	573.680	39,99
Jumlah	1.738.814	100	1.835.259	100	2.081.577	100	2.345.765	100	1.434.493	100

*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.3.4. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari turunnya rasio *Non Performing Loans* (NPLs) dari 3,17% menjadi 3,08%, dan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20%. Bila pembentukan pencadangan aktiva produktif diperhitungkan dalam rasio NPLs, maka rasio NPLs *net* perbankan pada triwulan laporan sebesar 1,75%, juga lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 1,94% dan 4,60%.

Grifik 3.5. Perkembangan NPLs Gross di Provinsi Riau



*) data sampai dengan Nopember 2007

Berdasarkan sektor yang dibiayai, sektor jasa-jasa sosial mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 12,12%, mengalami peningkatan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 12,19%. Selanjutnya sektor konstruksi mempunyai NPLs 7,33%, mengalami sedikit penurunan kualitas, namun mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 18,90%. Sektor jasa-jasa dunia usaha mengalami perbaikan kualitas menjadi 4,74%, sementara sektor perdagangan mengalami penurunan kualitas menjadi 3,70%. Selanjutnya, sektor pertanian, pengangkutan dan perindustrian masing-masing mengalami perbaikan kualitas yang masing-masing tercatat sebesar 3,55%, 1,22% dan 1,05%. Sektor listrik (listrik, gas dan air) pada triwulan laporan juga mengalami perbaikan kualitas menjadi 0,89%. Sementara itu, NPLs terendah adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 0,00%, mengalami perbaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 11,38%. Namun, kualitas kredit pada kedua sektor ini tidak terlalu mempengaruhi kualitas kredit secara keseluruhan, mengingat pangsa kredit pada kedua sektor ini relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 0,05% dan 0,40%.

Tabel 3.8. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau
(juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
		Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL
1	Pertanian	3.506.808	5,61%	3.466.878	5,73%	3.253.308	3,47%	3.125.330	3,60%	3.138.579	3,55%
2	Pertambangan	1.151	11,38%	1.305	10,19%	20.129	0,71%	53.557	0,00%	62.370	0,00%
3	Perindustrian	1.745.304	7,55%	1.740.767	8,34%	1.727.481	1,35%	1.641.003	1,07%	1.695.759	1,05%
4	Listrik, Gas dan Air	310	0,00%	305	22,30%	443	15,35%	6.427	1,06%	7.660	0,89%
5	Konstruksi	519.098	18,90%	504.644	19,32%	563.100	18,14%	737.319	7,16%	740.302	7,33%
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.717.918	5,56%	2.771.654	5,98%	3.042.450	5,79%	3.256.886	3,67%	3.374.660	3,70%
7	Pengangkutan, Pergud.	241.721	1,62%	216.115	2,18%	228.580	5,49%	322.346	3,68%	348.940	1,22%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	852.304	3,37%	889.009	3,88%	959.879	6,21%	986.694	4,88%	1.016.445	4,74%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	131.181	11,93%	129.868	11,90%	120.332	12,90%	117.785	12,19%	117.523	12,12%
10	Lain-lain	4.139.046	2,25%	4.281.890	2,24%	4.652.509	2,54%	5.008.474	2,14%	5.157.738	2,08%

*) data sampai dengan Nopember 2007

Berdasarkan penyebarannya, rasio NPLs tertinggi terdapat pada Kota Dumai, yaitu sebesar 5,21% atau mengalami perbaikan kualitas dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,43%, diikuti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis yang mencapai 3,46% dan 2,94%. Selanjutnya Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir masing masing tercatat 1,98% dan 0,66%.

Tabel 3.9. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pekanbaru	4,07%	4,52%	4,80%	3,58%	3,46%
2	Dumai	5,87%	5,79%	2,14%	2,43%	5,21%
3	Bengkalis	0,80%	1,36%	6,31%	5,44%	2,94%
4	Indragiri Hulu	2,22%	2,17%	0,85%	0,64%	1,98%
5	Indragiri Hilir	30,66%	29,98%	1,88%	1,69%	0,66%
6	Lainnya	0,61%	1,03%	2,78%	1,36%	1,14%

*) data sampai dengan Nopember 2007

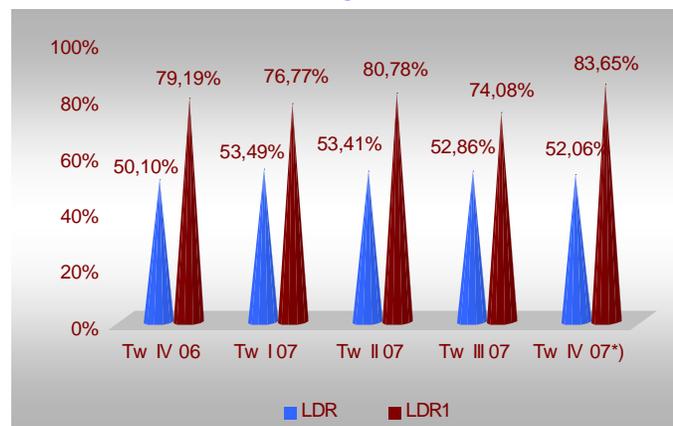
3.1.4. Intermediasi Perbankan

3.1.4.1. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan terjadi peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp.1.222 miliar (4,23%) dari Rp.28.858 miliar menjadi Rp.30.080 miliar. Berdasarkan kepemilikan peningkatan tersebut terjadi pada dana milik perorangan, sementara dana milik pemerintah daerah mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit sehingga menyebabkan

Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Riau pada periode laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 52,86% menjadi 52,06%. Di sisi lain, jika kredit yang disalurkan oleh perbankan di luar Provinsi Riau untuk membiayai proyek di Riau turut diperhitungkan, maka LDR mencapai 83,65%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 74,08%. Hal ini menunjukkan bahwa secara total penyaluran kredit perbankan di Provinsi Riau sudah cukup tinggi.

Grafik 3.6. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



Ket : LDR1 = rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK
*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp.11.038 miliar, tumbuh 2,60% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada triwulan laporan yang mencapai 2,64%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 70,48% dari total kredit. Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya penyerapan kredit berskala besar (*corporate*) yang menunjukkan potensi dari perbankan Riau dalam menarik minat para pengusaha dalam pengembangan bisnis dan usahanya, meskipun persentasenya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit kepada UMKM.

Tabel 3.10. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau
(juta rupiah)

Plafon	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	3.370.785	3.417.303	3.713.768	3.845.283	3.864.308
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	2.999.749	3.177.459	3.667.609	4.131.516	4.287.883
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	2.362.892	2.443.806	2.663.453	2.780.622	2.885.541
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	5.121.415	4.963.867	4.523.381	4.498.400	4.622.244
Total Kredit	13.854.841	14.002.435	14.568.211	15.255.821	15.659.976
Total Kredit UMKM	8.733.426	9.038.568	10.044.830	10.757.421	11.037.732
(% terhadap Total Kredit)	63,04%	64,55%	68,95%	70,51%	70,48%

*) data sampai dengan Nopember 2007

Menurut jenis penggunaan, sebesar 53,42% dari total pembiayaan kepada UMKM digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi) dan sisanya untuk pembiayaan konsumsi. Pangsa pembiayaan kepada sektor produktif ini sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 53,59%, sedangkan pangsa kredit konsumsi menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.11. Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan (juta rupiah)

Jenis Penggunaan	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1. Modal Kerja	3.140.615	35,96	3.174.575	35,12	3.495.440	34,80	3.733.555	34,71	3.826.031	34,66
2. Investasi	1.475.296	16,89	1.603.132	17,74	1.918.314	19,10	2.031.824	18,89	2.070.709	18,76
3. Konsumsi	4.117.515	47,15	4.260.861	47,14	4.631.076	46,10	4.992.042	46,41	5.140.992	46,58
Jumlah	8.733.426	100	9.038.568	100	10.044.830	100	10.757.421	100	11.037.732	100

*) data sampai dengan Nopember 2007

Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, sektor perdagangan mempunyai pangsa terbesar yaitu mencapai 25,11%, diikuti sektor pertanian sebesar 12,19%, sektor jasa dunia usaha 7,41%, sektor konstruksi 4,43%, perindustrian 1,76%, pengangkutan 1,71%, jasa sosial masyarakat 0,41%, pertambangan 0,09%, dan listrik 0,07%, sementara sektor lain-lain mencapai 46,82%.

Tabel 3.12. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian	880.594	10,08	966.182	10,69	1.257.009	12,51	1.322.457	12,29	1.345.099	12,19
2	Pertambangan	1.151	0,01	1.305	0,01	4.429	0,04	3.825	0,04	10.483	0,09
3	Perindustrian	180.876	2,07	209.643	2,32	219.957	2,19	199.799	1,86	194.294	1,76
4	Listrik, Gas dan Air	310	0,00	305	0,00	443	0,00	6.427	0,06	7.660	0,07
5	Konstruksi	299.464	3,43	283.395	3,14	332.702	3,31	481.789	4,48	488.523	4,43
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.296.872	26,30	2.318.826	25,65	2.548.769	25,37	2.711.701	25,21	2.771.092	25,11
7	Pengangkutan, Pergud.	162.208	1,86	161.837	1,79	172.371	1,72	180.054	1,67	188.863	1,71
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	699.935	8,01	743.087	8,22	799.970	7,96	786.128	7,31	817.616	7,41
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	40.441	0,46	41.020	0,45	39.981	0,40	43.206	0,40	45.764	0,41
10	Lain-lain	4.171.575	47,77	4.312.968	47,72	4.669.199	46,48	5.022.035	46,68	5.168.338	46,82

*) data sampai dengan Nopember 2007

Kualitas kredit UMKM mengalami perbaikan yang tercermin dari penurunan rasio NPLs terhadap total kredit UMKM dari 3,26% menjadi 3,11% pada triwulan laporan. Bila dilihat berdasarkan sektor ekonominya, sektor jasa sosial masyarakat mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 12,05%, diikuti konstruksi 6,96%, perindustrian 5,56%, perdagangan 3,87%, pertanian 3,52%, jasa dunia usaha 2,82%, pengangkutan 2,25%, listrik 0,89%, dan sektor pertambangan mempunyai NPLs terendah yaitu sebesar 0,00%. Sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 11,38%. Namun sektor ini terus menunjukkan perbaikan kualitas, seiring dengan semakin meningkatnya kredit yang diserap.

Tabel 3.13. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pertanian	2,80%	4,01%	3,85%	3,66%	3,52%
2	Pertambangan	11,38%	10,19%	3,23%	0,00%	0,00%
3	Perindustrian	5,86%	8,55%	7,43%	5,30%	5,56%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	22,30%	15,35%	1,06%	0,89%
5	Konstruksi	8,92%	9,22%	9,60%	6,72%	6,96%
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,22%	3,67%	4,01%	3,77%	3,87%
7	Pengangkutan, Pergud.	2,41%	2,92%	2,93%	2,75%	2,25%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	1,73%	2,41%	4,52%	2,93%	2,82%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	16,63%	16,30%	16,08%	13,01%	12,05%
10	Lain-lain	2,31%	2,30%	2,61%	2,20%	2,14%

*) data sampai dengan Nopember 2007

Bila dilihat dari penyebarannya, maka dalam triwulan laporan NPLs UMKM tertinggi masih tercatat di Kota Dumai, yaitu mencapai 5,67%, namun mengalami perbaikan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini seiring dengan NPLs secara keseluruhan, dimana Kota Dumai juga mempunyai NPLs tertinggi. Sedangkan NPLs UMKM terendah juga masih tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu yang tercatat 1,13%, namun NPLs pada kabupaten ini mengalami penurunan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,82%.

Tabel 3.14. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pekanbaru	3,13%	3,91%	4,02%	3,63%	3,59%
3	Bengkalis	0,80%	1,36%	2,17%	2,44%	2,96%
2	Dumai	6,46%	6,37%	6,79%	5,91%	5,67%
5	Indragiri Hilir	0,85%	1,35%	1,77%	1,28%	1,35%
4	Indragiri Hulu	0,47%	1,04%	0,93%	0,82%	1,13%
6	Lainnya	2,11%	1,03%	2,78%	1,36%	1,14%

*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.5. Kondisi Likuiditas

Dana jangka menengah dan panjang mengalami peningkatan 0,41%, sementara dana jangka pendek meningkat 4,35%. Di sisi lain, alat likuid perbankan berupa kas dan SBI mengalami penurunan sebesar 10,83% yang disebabkan oleh penurunan pada komponen SBI dan kas perbankan. Dana jangka pendek mengalami peningkatan sementara alat likuid mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan menurunnya kondisi likuiditas perbankan Riau.

3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga

Posisi Dana Pihak Ketiga dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.30.080 miliar, naik sebesar Rp.1.222 miliar (4,23%) dari DPK triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.28.858 miliar. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen dana, giro dan deposito masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,91% dan 1,80%, sementara komponen tabungan mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 8,66%. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan *maturity* (jatuh tempo), deposito berjangka pendek

(s.d. 3 bulan) mengalami peningkatan sebesar 1,98%, sementara deposito berjangka waktu menengah dan panjang sebesar 0,41% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, maka pangsa DPK jangka pendek terhadap total DPK mencapai 97,22%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 97,11%.

Tabel 3.15. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
Jangka Pendek					
- Giro	12.166	11.166	11.002	11.693	11.917
- Tabungan	9.157	8.625	9.124	10.041	10.911
- Deposito (s.d 3 bln)	5.700	5.796	6.553	6.290	6.415
Total	27.023	25.586	26.679	28.025	29.243
Jangka Menengah dan Panjang					
- Deposito 3-6 bln	223	272	312	331	340
- Deposito 6-12 bln	234	218	267	333	334
- Deposito > 12 bln	167	103	21	170	163
Total	625	593	600	834	837
Total DPK	27.648	26.179	27.278	28.858	30.080

*) data sampai dengan Nopember 2007

Berdasarkan kepemilikannya, dalam triwulan laporan kepemilikan DPK masih tetap didominasi oleh nasabah perorangan dengan pangsa 54,76% dari total DPK yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (5,74%), diikuti dengan nasabah pemerintah daerah dengan pangsa 29,23%, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,25%). Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada kepemilikan dana koperasi, yang mengalami peningkatan sebesar 48,42% %, namun hanya memiliki pangsa 1,09% dari total DPK.

Tabel 3.16. Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah)

No	Kepemilikan	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Pemerintah Pusat	332.244	146.652	129.184	272.289	292.207
2	Pemerintah Daerah	8.810.308	8.717.756	8.775.944	9.086.932	8.791.868
3	Badan/ Lembaga Pemerintah	283.123	262.742	106.510	92.139	97.754
4	Badan Usaha Milik Negara	298.184	188.739	294.488	271.817	254.679
5	Badan Usaha Milik Daerah	31.091	14.738	45.737	63.420	55.917
6	Perusahaan Asuransi	176.575	215.061	255.689	219.239	211.516
7	Perusahaan Swasta	2.571.259	2.013.415	2.439.163	2.502.019	2.939.030
8	Yayasan dan Badan Sosial	168.372	221.694	157.779	153.814	178.212
9	Koperasi	239.056	319.939	181.070	221.489	328.744
10	Perorangan	14.298.921	13.714.750	14.524.592	15.578.651	16.472.336
11	Lainnya	430.730	348.934	355.559	391.575	451.987
12	Bukan Penduduk	13.616	15.067	12.518	4.911	5.555

*) data sampai dengan Nopember 2007

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih ditempati oleh Kota Pekanbaru sebesar 56,63%, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 10,74% dan 6,53%. Peningkatan DPK terjadi pada semua kota/kabupaten. Peningkatan terbesar terjadi di Kota Dumai yang naik sebesar 6,19%, namun peningkatan DPK di dominasi oleh Kota Pekanbaru (70,63%). Sementara itu, peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 0,95%.

Tabel 3.17. Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
		Rp. Juta	%								
1	Pekanbaru	14.730.699	53,27	14.046.210	53,65	15.113.767	55,41	16.171.331	56,04	17.034.106	56,63
3	Bengkalis	3.013.455	10,90	2.911.756	11,12	3.029.624	11,11	3.117.676	10,80	3.230.597	10,74
2	Dumai	1.741.626	6,30	1.656.496	6,33	1.715.305	6,29	1.848.436	6,41	1.962.937	6,53
5	Indragiri Hilir	882.450	3,19	872.256	3,33	928.644	3,40	952.058	3,30	961.062	3,20
4	Indragiri Hulu	1.258.673	4,55	1.067.302	4,08	1.184.178	4,34	1.162.867	4,03	1.219.476	4,05
6	Lainnya	6.026.576	21,79	5.625.467	21,49	5.306.715	19,45	5.605.927	19,43	5.671.627	18,86
Jumlah		27.653.479	100	26.179.487	100	27.278.233	100	28.858.295	100	30.079.805	100

*) data sampai dengan Nopember 2007

Dalam triwulan laporan, jumlah rekening DPK bertambah dari 1.686.512 rekening menjadi 1.712.920 rekening (1,57%). Pertumbuhan rekening tertinggi terjadi pada rekening dengan saldo Rp.250 juta sampai dengan Rp.1.000 juta (32,20%). Sementara penurunan tertinggi terjadi pada rekening dengan saldo Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta (10,12%). Namun penambahan rekening tersebut didominasi oleh rekening dengan saldo sampai dengan Rp.1 juta.

Seiring dengan penambahan rekening pada nominal Rp.250 juta sampai dengan Rp.1.000, maka jumlah nominal pada rekening tersebut juga mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp.696 miliar (24,92%), sementara pengurangan terbesar terjadi pada nominal Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta (7,94%).

Tabel 3.18. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau

Klasifikasi	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07		Tw IV 07*)	
	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)						
< Rp.1 juta	979.642	568.694	915.527	506.584	1.148.579	623.768	1.190.779	665.231
Rp.1 juta s.d. <Rp.10 juta	203.330	560.285	280.824	721.713	266.026	764.178	239.269	750.993
Rp.10 juta s.d. <Rp.50 juta	185.332	4.295.640	182.495	3.897.581	223.133	5.002.633	230.305	5.299.651
Rp.50 juta s.d. <Rp.100 juta	20.802	1.597.840	22.776	1.713.674	15.689	1.145.769	19.867	1.386.042
Rp.100 juta s.d. <Rp.250 juta	19.659	3.256.087	22.587	3.845.683	24.840	4.461.835	22.325	4.107.509
Rp.250 juta s.d. <Rp.1.000 juta	5.992	2.751.411	5.722	2.651.695	6.059	2.794.237	8.010	3.490.595
Rp.1.000 juta s.d. <Rp.10.000 juta	1.782	4.424.235	2.055	5.310.013	1.997	4.055.260	2.173	4.749.418
>=Rp.10.000 juta	150	8.715.915	169	8.631.290	193	10.010.615	192	9.630.366
Total	1.416.689	26.170.107	1.432.155	27.278.233	1.686.516	28.858.295	1.712.920	30.079.805

*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.5.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan Provinsi Riau sebesar Rp.6.433 miliar atau menurun 10,83% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut didominasi oleh penurunan pada komponen SBI (11,76%), yang disebabkan oleh menurunnya jumlah giro pada bank pemerintah. Di sisi lain jumlah *Non Core Deposit* (NCD)¹ perbankan Provinsi Riau juga meningkat sebesar 4,35% dari Rp.8.407 miliar menjadi Rp.8.773 miliar. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen dana yaitu giro, tabungan, dan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan yang masing-masing tercatat sebesar 1,91%, 8,66% dan 1,98%.

Tabel 3.19. Perkembangan Alat Likuid dan *Non Core Deposit*

Alat Likuid	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
Kas	768.834	576.120	671.645	755.539	733.827
SBI	8.255.746	7.108.831	6.918.178	6.458.342	5.698.928
Jumlah	9.024.580	7.684.951	7.589.823	7.213.881	6.432.755

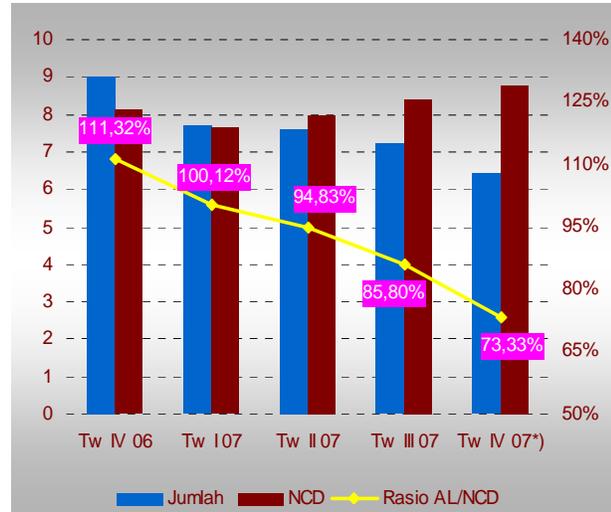
Non Core Deposit (NCD)	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
Giro (30%)	3.649.679	3.349.662	3.300.474	3.507.990	3.575.149
Tabungan (30%)	2.747.231	2.587.577	2.737.340	3.012.296	3.273.219
Dep 1-3 bln (30%)	1.710.041	1.738.700	1.965.795	1.887.100	1.924.449
NCD	8.106.952	7.675.939	8.003.609	8.407.387	8.772.817

*) data sampai dengan Nopember 2007

Dengan perkembangan tersebut maka rasio Alat Likuid terhadap NCD mengalami penurunan dari 85,80% menjadi 73,33%, yang mengindikasikan turunnya kondisi likuiditas perbankan di provinsi Riau. Sepanjang tahun 2006, rasio ini terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan sejak awal triwulan 2007 sampai dengan triwulan IV-2007. Hal ini terjadi karena pertumbuhan NCD lebih tinggi daripada pertumbuhan alat likuid. Walaupun terjadi penurunan, namun rasio tersebut masih cukup aman.

¹ Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Grifik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit*



*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.6. Profitabilitas

Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih terus menunjukkan peningkatan. Penurunan suku bunga kredit yang diimbangi juga dengan penurunan beban operasional bank yang berasal dari beban dana masyarakat membuat perbankan tetap dapat memperoleh profit, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena margin yang dinikmati perbankan juga mengalami penurunan.

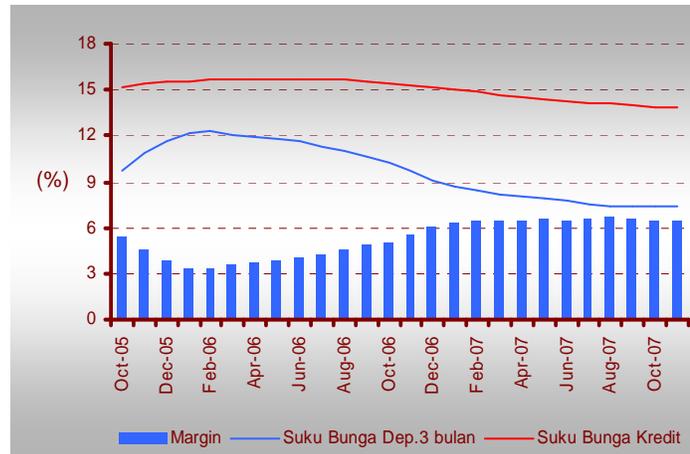
3.1.6.1. Spread Bunga

Selama triwulan laporan, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada tingkat 8,25%. Meningkatnya harga minyak dunia dan belum berakhirnya dampak dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat serta dampaknya terhadap ekspansi perekonomian dan inflasi yang diperkirakan relatif terbatas, menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan tingkat BI Rate.

Kalangan perbankan merespon kebijakan ini dengan tetap menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 6 bps, dari 7,40% pada akhir Tw III-2007 menjadi 7,34% pada Tw IV-2007. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) turun

sebesar 15 bps dari 13,98% pada akhir Tw III-2007 menjadi 13,83% pada Tw IV-2007. Dengan demikian *spread* yang dinikmati perbankan pada triwulan laporan tercatat sebesar 6,49%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan *spread* pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,58%.

Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito

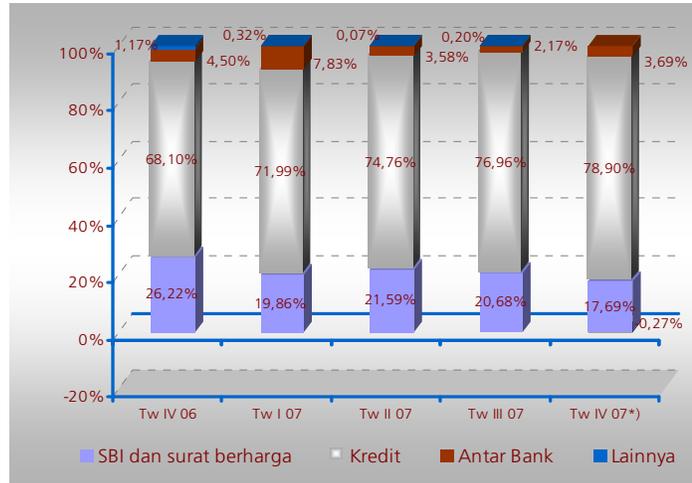


*) data sampai dengan Nopember 2007

3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Selama triwulan laporan, perbankan Provinsi Riau mencatat pendapatan bunga sebesar Rp.443 miliar, sehingga sampai dengan triwulan IV-2007 tercatat memperoleh pendapatan sebesar Rp.2.526 miliar. Pangsa terbesar berasal dari pendapatan bunga kredit yang mencapai 78,90%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Selanjutnya pendapatan bunga dari SBI dan surat-surat berharga (17,69%), mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini didorong oleh menurunnya penanaman dalam bentuk SBI oleh perbankan Riau. Peningkatan pendapatan bunga kredit ini juga sebagai akibat dari meningkatnya nominal kredit kategori lancar dan menurunnya jumlah kredit kategori non lancar pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

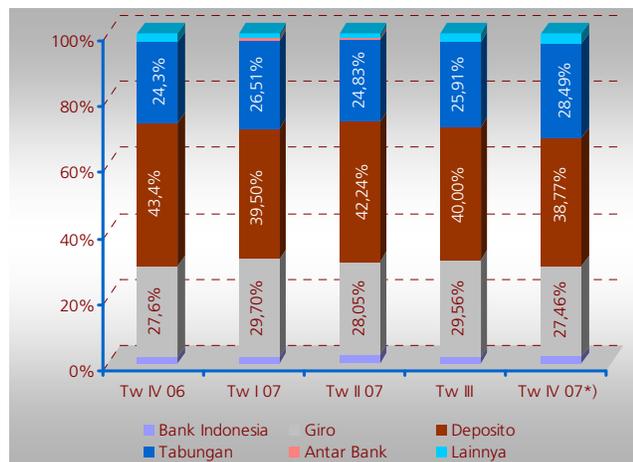
Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga



*) data sampai dengan Nopember 2007

Di sisi lain, beban bunga yang dikeluarkan perbankan selama triwulan laporan, tercatat sebesar Rp.216 miliar, sehingga sampai dengan triwulan IV-2007 mencapai Rp.1.213 miliar. Pembayaran bunga untuk dana pihak ketiga mencapai 94,73% dari total pembayaran bunga yang dibayarkan oleh perbankan, menurun bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 95,47%, sehingga jumlah dana pihak ketiga cukup mempengaruhi beban bunga yang dikeluarkan perbankan. Penurunan beban bunga terjadi pada semua komponen dana yaitu giro, tabungan dan deposito. Penurunan beban bunga seiring dengan semakin menurunnya suku bunga dana yang diterapkan oleh perbankan.

Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga



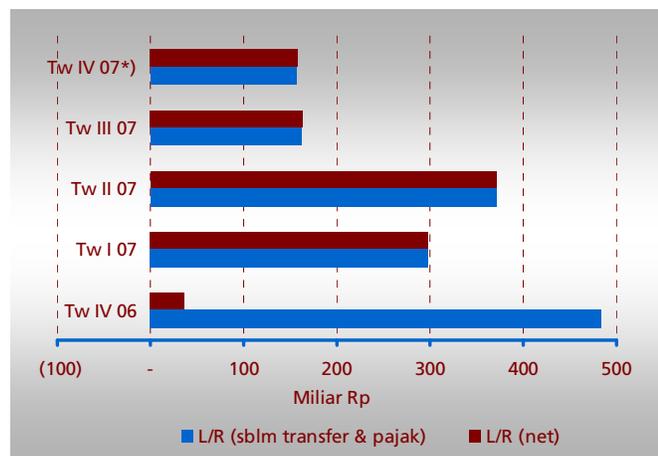
*) data sampai dengan Nopember 2007

Seiring dengan penurunan beban bunga dana pihak ketiga dan peningkatan penyaluran kredit oleh bank, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan juga mencapai Rp. 227 miliar.

3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan perbankan Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp.157 miliar. Peningkatan laba tersebut disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit sehingga pendapatan operasional yang didominasi oleh kredit juga mengalami peningkatan. Sementara itu di sisi lain, turunnya beban operasional karena penurunan suku bunga dana juga menjadi pendorong perolehan laba selama triwulan laporan.

Grafik 3.11. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)



*) data sampai dengan Nopember 2007

3.2. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dibanding dengan triwulan sebelumnya baik dari jumlah bank, DPK, dan kredit yang disalurkan, meskipun terjadi penurunan pada aset BPR. Membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Riau, mendorong pertumbuhan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 1 kantor, dan saat ini sedang diproses ijin 8 BPR sehingga pada tahun 2008 jumlah BPR diperkirakan mencapai 28 bank. Aset BPR mengalami penurunan sebesar 2,85% sehingga menjadi 379 miliar, meskipun terjadi

peningkatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp.283 miliar atau sebesar 7,04% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan kredit tumbuh 2,78% dari Rp.212 miliar menjadi Rp.218 miliar. Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan diikuti oleh peningkatan kualitas kredit BPR/S yang terlihat dari menurunnya rasio NPLs terhadap total kredit dari 7,35% menjadi 6,93%. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, menyebabkan turunnya angka LDR BPR dari 80,13% menjadi 76,94%.

Tabel 3.20. Perkembangan Usaha BPR/BPRS
Di Provinsi Riau (juta rupiah)

Keterangan	Periode				
	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1. Jumlah BPR/S	15	15	16	19	20
2. Asset	277.692	300.156	319.085	390.270	379.143
3. DPK	187.435	201.194	211.863	264.562	283.179
4. Kredit	168.737	184.462	199.303	211.992	217.875
5. NPL (nominal)	12.090	14.620	16.914	15.587	15.091
LDR (%)	90,02	91,68	94,07	80,13	76,94
NPLs (%)	7,16	7,93	8,49	7,35	6,93

*) data sampai dengan Nopember 2007

Namun, bila dilihat dari beberapa indikator, kinerja BPR di Provinsi Riau pada triwulan laporan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPR dengan $CAR \geq 20\%$ bertambah 1 BPR, sedangkan BPR dengan $ROA < 1$ bertambah 2 BPR, dan $1 < ROA \leq 5$ bertambah 1 BPR, dan $ROA > 5$ berkurang 1 BPR menjadi 4 BPR. Hal ini seiring dengan adanya penurunan pada aset BPR.

Tabel 3.21. Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS
Di Provinsi Riau

Keterangan	Jumlah BPR/BPRS				
	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1. CAR (%)					
a. 1 s.d. < 10	0	0	0	0	0
b. 10 s.d. < 20	1	2	2	4	4
c. ≥ 20	14	13	13	14	16
2. ROA (%)					
a. < 1	5	5	4	6	8
b. 1 - 5	8	6	7	7	8
c. > 5	2	4	4	5	4

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.3. Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah pada triwulan laporan tetap menunjukkan perkembangan semakin membaik dibandingkan dengan triwulan selanjutnya. Dengan jumlah kelembagaan yang masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu 5 bank yang terdiri dari 2 bank syariah dan 3 Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel 3.22. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode				
		Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07	Tw IV 07*)
1	Jumlah Bank	5	5	5	5	5
2	Asset	622.352	701.639	790.394	863.588	922.752
3	DPK	456.042	449.626	500.181	536.943	678.362
4	Pembiayaan	476.595	468.128	553.247	678.113	678.999
5	Nominal NPF	19.773	24.274	22.989	23.212	16.221
6	NPF	4,15%	5,19%	4,16%	3,42%	2,39%
7	FDR	104,51%	104,11%	110,61%	126,29%	100,09%

Bank Syariah dan UUS

*) data sampai dengan Nopember 2007

Total aset perbankan syariah pada triwulan laporan tumbuh 6,85% menjadi Rp.923 miliar. Peningkatan aset ini disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga yang cukup tinggi yang mencapai 26,34% menjadi Rp.678 miliar. Meningkatnya DPK diimbangi juga dengan peningkatan pembiayaan yaitu tumbuh 0,13% menjadi Rp.679 miliar. Seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat, Pertumbuhan dana yang lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan berdampak pada penurunan FDR syariah dari 126,29% menjadi 100,09%, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio LDR pada bank konvensional maupun BPR.

Dilihat dari sektor yang dibiayai 39,20% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa terutama jasa dunia usaha, 18,66% untuk sektor lainnya (konsumsi), 13,86% kepada sektor pertanian dan 13,46% untuk sektor pertanian dan 12,71% diserap oleh sektor pengangkutan (pengangkutan, pergudangan dan komunikasi). Kualitas pembiayaan pada akhir triwulan laporan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan kualitas pembiayaan pada triwulan sebelumnya, yang terlihat dari penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPFs) terhadap total pembiayaan dari 3,42% menjadi 2,39%.

sebesar 6,25% dan 6,24%. Sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi di kabupaten Kuantan Singingi yang tercatat sebesar 2,27%.

Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Kerja & Angkatan Kerja Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	2004		2005		2006	
		Ten. Kerja	Angk. Kerja	Ten. Kerja	Angk. Kerja	Ten. Kerja	Angk. Kerja
1	Kuantan Singingi	161,343	121,523	165,042	124,672	168,793	127,820
2	Indragiri Hulu	178,842	123,796	182,952	126,788	187,121	129,769
3	Indragiri Hilir	421,520	386,577	433,616	421,764	445,973	459,860
4	Pelalawan	130,049	100,612	138,225	108,299	146,887	116,499
5	Siak	193,656	137,344	203,338	144,208	213,463	151,318
6	Kampar	372,414	266,367	395,714	286,782	420,391	308,564
7	Rokan Hulu	221,034	181,136	234,890	195,257	249,567	210,344
8	Bengkalis	423,708	254,933	444,873	265,192	467,005	275,687
9	Rokan Hilir	269,030	167,273	282,469	174,357	296,522	181,624
10	Pekanbaru	472,763	240,448	487,167	244,825	501,912	249,121
11	Dumai	142,790	72,698	149,923	74,452	157,384	76,199
Jumlah		2,987,149	2,052,707	3,118,209	2,166,596	3,255,018	2,286,805

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dari jumlah tenaga kerja tersebut hanya 2,29 juta jiwa yang merupakan angkatan kerja² (70,25%), sedangkan sisanya merupakan tenaga kerja yang belum dan bukan lagi angkatan kerja. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, 34,91% merupakan lulusan SLTA, 34,59% tamat SD, 16,55% lulusan SLTP dan 8,210% tidak tamat SD. Sementara lulusan universitas dan lulusan D I sampai dengan D III masing-masing tercatat sebesar 3,01% dan 2,86%. Jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi yang relatif rendah menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan di Riau, sehingga disinyalir sebagian besar masyarakat Riau cenderung memilih melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan di luar Provinsi Riau. Angkatan kerja ini mengalami pertumbuhan 5,55%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan angkatan kerja ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk maupun pertumbuhan tenaga kerja.

² Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan

Tabel 4.3. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Tidak Tamat SD	259.228	243.467	228.099	213.211	198.873	185.138
2	SD	612.389	647.503	682.938	718.662	754.656	790.907
3	SLTP	288.951	306.379	324.055	341.965	360.102	378.462
4	SLTA	500.093	551.649	607.015	666.408	730.065	798.243
5	D I, II, dan III	39.714	44.073	48.790	53.888	59.393	65.333
6	Universitas	45.341	49.501	53.908	58.572	63.506	68.722
Jumlah		1.745.716	1.842.572	1.944.805	2.052.706	2.166.595	2.286.805

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan kesempatan kerja³, hanya tersedia 2,17 juta kesempatan kerja, sehingga terdapat *gap* antara angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia, atau dengan kata lain terdapat pengangguran sebesar 115 ribu orang pada tahun 2006 di Riau. Dari kesempatan kerja yang tersedia terdapat 1,15 juta jiwa (52,79%) yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), 405 ribu jiwa (18,66%) sebagai tenaga produksi (produksi dan operator alat angkut), dan 302 ribu jiwa (13,89%) sebagai tenaga usaha penjualan. Sementara jumlah terkecil bekerja sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatausahaan yang tercatat sebanyak 6,2 ribu jiwa (0,28%).

Besarnya kesempatan kerja pada sektor pertanian sejalan dengan kondisi geografis Riau yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakatnya juga bekerja pada sektor ini. Selain itu, jumlah kesempatan kerja pada sektor pertanian ini kemungkinan didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD sampai dengan SLTA, yang juga tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja pada tingkat pendidikan tersebut.

Sementara jumlah tenaga kerja profesional dan tenaga di bidang kepemimpinan yang relatif sedikit sejalan dengan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi yang juga relatif kecil. Jika dilihat dari banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Riau yang berskala nasional dan internasional, maka dinyalir tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka didatangkan dari luar Provinsi Riau. Hal ini disebabkan kualifikasi tenaga kerja yang mereka butuhkan belum bisa dipenuhi dari

³ Kesempatan kerja merupakan jumlah pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja

Provinsi Riau, yang juga tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD sampai dengan SLTA.

Tabel 4.4. Kesempatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

No.	Jenis Pekerjaan Utama	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Tenaga Profesional, Teknisi & Sejenisnya	79.650	84.238	89.090	94.222	99.650	105.390
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatausahaan	4.656	4.924	5.208	5.508	5.825	6.161
3	Tenaga tata Usaha dan Tenaga sejenis	95.200	100.683	106.482	112.615	119.101	125.961
4	Tenaga Usaha Penjualan	227.977	241.109	254.997	269.684	285.218	301.647
5	Tenaga Usaha Jasa	61.190	64.715	68.442	72.384	76.553	80.962
6	Tenaga Usaha Pertanian Kehutanan & Perikanan	866.298	916.197	968.970	1.024.783	1.083.810	1.146.237
7	Tenaga Produksi, Operator Alat Angkut	306.165	323.800	342.451	362.177	383.038	405.102
Jumlah		1.641.136	1.735.666	1.835.640	1.941.373	2.053.195	2.171.460

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan jumlah jam kerja⁴, 694 ribu jiwa kesempatan kerja bekerja selama 45 – 59 jam/minggu, dan diikuti yang bekerja 35 – 44 jam/minggu yang mencapai 596 ribu jiwa. Sementara jumlah kesempatan kerja terkecil bekerja sampai dengan 9 jam/minggu yang tercatat sebesar 103 ribu jiwa.

Tabel 4.5. Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja

No.	Jam Kerja	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	0 - 9	57.731	64.974	73.015	81.929	91.796	102.699
2	10 - 24	230.692	230.860	230.680	230.156	229.293	228.099
3	25 - 34	223.640	223.708	223.438	222.835	221.905	220.655
4	35 - 44	459.747	485.691	512.326	539.614	567.514	595.982
5	45 - 59	481.509	519.522	559.693	602.069	646.694	693.608
6	60 +	187.816	210.910	236.486	264.768	295.993	330.416
Jumlah		1.641.135	1.735.665	1.835.638	1.941.371	2.053.195	2.171.459

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

⁴ Jam Kerja merupakan jumlah seluruh jam kerja bagi yang bekerja selama seminggu, tidak termasuk jam kerja istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan

3. Tingkat Pengangguran Daerah

Jumlah pengangguran di Riau semakin menunjukkan peningkatan jumlah, dengan jumlah pengangguran terbesar berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu sebanyak 36, 18 ribu jiwa (31,37%), sementara jumlah terkecil berasal dari kelompok umur 60 – 64 tahun yang berjumlah 1,1 ribu jiwa (0,88%).

Tabel 4.6. Pengangguran Menurut Kelompok Umur

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	15 - 19	30.285	30.333	30.376	30.415	30.450	30.482
2	20 - 24	39.626	39.793	39.591	38.963	37.848	36.183
3	25 - 29	18.091	18.039	17.932	17.776	17.577	17.344
4	30 - 34	6.972	7.519	8.172	8.946	9.860	10.932
5	35 - 39	3.668	4.165	4.738	5.392	6.132	6.962
6	40 - 44	2.258	2.699	3.203	3.775	4.417	5.134
7	45 - 49	1.422	1.674	1.971	2.314	2.707	3.153
8	50 - 54	857	993	1.147	1.317	1.505	1.708
9	55 - 59	577	684	799	922	1.051	1.187
10	60 - 64	418	503	604	722	860	1.018
11	65 +	407	505	632	793	994	1.242
Riau		104.581	106.907	109.165	111.335	113.401	115.345

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan sebarannya pada kabupaten/kota, pengangguran terbesar berasal dari Kabupaten Kampar yang mencapai 22,19 ribu jiwa (19,24%), diikuti Indragiri Hilir sebesar 16,31 ribu jiwa (14,14%). Sementara itu, pengangguran terkecil berasal dari Kota Dumai yang tercatat sebesar 4,6 ribu orang (4,01%).

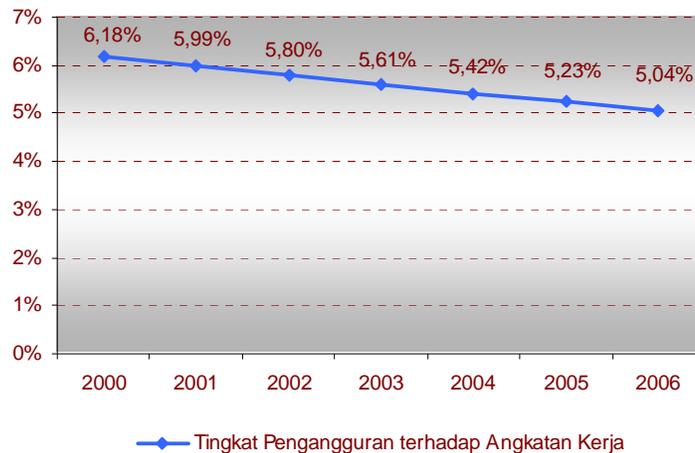
Tabel 4.7. Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Kuantan Singingi	5.421	5.786	6.150	6.511	6.870	7.224
2	Indragiri Hulu	4.914	5.308	5.702	6.095	6.486	6.873
3	Indragiri Hilir	11.203	12.167	13.167	14.196	15.247	16.312
4	Pelalawan	3.876	4.318	4.792	5.299	5.841	6.417
5	Siak	6.439	7.038	7.662	8.312	8.986	9.684
6	Kampar	13.786	15.246	16.812	18.490	20.282	22.195
7	Rokan Hulu	5.994	6.654	7.357	8.105	8.898	9.736
8	Bengkalis	16.424	16.148	15.778	15.308	14.731	14.037
9	Rokan Hilir	9.450	9.852	10.246	10.632	11.007	11.368
10	Pekanbaru	20.541	18.167	15.616	12.885	9.970	6.871
11	Dumai	6.532	6.224	5.881	5.502	5.084	4.628
Jumlah		104.580	106.908	109.163	111.335	113.402	115.345

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengangguran membuat tingkat pengangguran dibandingkan jumlah penduduk Riau cenderung menurun. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran di Riau tercatat sebesar 5,04%, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 4.1. Tingkat Pengangguran di Riau



sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan Survey Ekspektasi Konsumen (SEK) triwulan IV tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, terjadi peningkatan konsumen mengenai peningkatan penghasilan sampai dengan 1 tahun ke depan. Naiknya omset penjualan menjelang Hari Raya dan tahun Baru serta tambahan insentif dari Tunjangan hari Raya (THR) telah meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai pendapatannya saat ini akan lebih baik dibandingkan periode yang akan datang.

Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap tingkat pengangguran juga menunjukkan peningkatan pesimistis yang artinya masyarakat meyakini bahwa akan tingkat pengangguran akan mengalami penurunan sampai dengan periode 1 tahun ke depan.

4. Produktivitas Tenaga Kerja Daerah

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau membawa dampak yang positif pada penambahan kesempatan kerja di Provinsi Riau. dari tabel di bawah terlihat bahwa PDRB tertinggi adalah sektor pertambangan yang mencapai Rp.70,42 triliun dengan jumlah kesempatan kerja yang tercipta 51.503 jiwa. Sementara sektor listrik (listrik, gas, dan air) menunjukkan jumlah PDRB terkecil, namun mampu menciptakan kesempatan kerja mencapai 6.679 jiwa.

Namun jika dilihat dari produktivitasnya, sektor pertambangan mampu menciptakan produktivitas tertinggi, meskipun menciptakan lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan sektor pertanian. Sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi, hanya produktivitas sektor ini relatif kecil dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Tabel 4.8. Tabel Produktivitas Kerja di Provinsi Riau

No.	Lapangan Usaha	2005		2006		Produktivitas Tahun 2005	Produktivitas Tahun 2005
		Kesempatan Kerja	PDRB (Juta Rupiah)	Kesempatan Kerja	PDRB (Juta Rupiah)		
1	Pertanian	1.082.629	30.171.587	1.144.988	36.294.176	28	32
2	Pertambangan	48.697	57.927.710	51.503	70.427.525	1.190	1.367
3	Industri	139.262	27.881.009	147.282	32.313.284	200	219
4	Listrik, Gas, dan Air	6.315	303.327	6.679	339.751	48	51
5	Bangunan	83.758	3.467.557	88.582	4.258.801	41	48
6	Perdagangan	297.306	9.124.858	314.431	11.179.723	31	36
7	Perhubungan	93.935	2.694.578	99.346	3.216.185	29	32
8	Keuangan	9.384	2.569.167	9.924	3.134.172	274	316
9	Jasa dan Lainnya	291.909	4.879.204	308.723	5.904.571	17	19
Jumlah		2.053.195	139.018.996	2.171.458	167.068.189	68	77

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan Badan Pusat Statistik

2.2. Penyediaan uang kartal layak edar

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang yang tidak layak edar baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang. Pada triwulan laporan, jumlah uang kertas yang di PTTB di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp127,16 miliar atau naik 6,62 % dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah PTTB pada triwulan laporan mencapai 19,78 % dari jumlah uang yang masuk (Inflow). Kondisi ini mengingat pada triwulan laporan uang yang masuk melalui setoran dari perbankan terdiri dari uang yang layak edar dan uang yang tidak layak edar.

Selain itu, secara rutin dilakukan kegiatan penukaran uang meliputi : (i) pelayanan penukaran uang lusuh atau rusak yang diselenggarakan pada setiap hari Selasa; (ii) pelayanan penukaran uang pecahan kecil yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis; dan (iii) kegiatan kas keliling atau pelayanan kas yang dilakukan di luar Kantor Bank Indonesia baik di kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Khusus mengantisipasi kebutuhan pecahan kecil dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan tahun baru kegiatan penukaran uang di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru yang semula dilakukan 3 kali dalam seminggu, ditingkatkan menjadi 4 kali seminggu (Senin, Selasa, Rabu dan Kamis). Demikian pula halnya terhadap penukaran uang lusuh/rusak yang semula dilaksanakan 1 kali seminggu (setiap hari Selasa) menjadi 4 kali seminggu (Senin, Selasa, Rabu dan Kamis). Sementara kegiatan kas keliling di kota Pekanbaru dan di luar kota Pekanbaru yaitu Pasir Pengarayan pada triwulan laporan mencapai Rp800 juta, dan kegiatan penukaran yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia mencapai Rp38,44 miliar, naik 63,99% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp23,44 miliar.

2.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia Pekanbaru dari setoran bank umum pada triwulan laporan tercatat sebanyak 15 lembar, atau 0,00007% dari jumlah lembar uang kertas yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia, artinya dalam setiap 10 juta lembar uang yang masuk terdapat 7 lembar uang palsu. Dari sisi bilyet

terjadi penurunan dari 19 lembar pada triwulan III – 2007, menjadi 15 lembar pada triwulan laporan. Untuk mengurangi peredaran uang palsu, KBI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah secara langsung kepada masyarakat.

3. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai

3.1. Kliring

Aktivitas transaksi pembayaran nontunai melalui sistem kliring selama triwulan laporan dari sisi warkat menurun di bandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu mencapai 236.299 lembar atau turun 15.412 lembar (6,12%). Namun jumlah nominal kliring meningkat 3,11 % dari Rp 5.019,95 miliar pada triwulan III 2007 menjadi Rp5.176,17 miliar juta pada triwulan laporan.

Tabel 5.1. Perkembangan Kliring di Provinsi Riau
(dalam juta rupiah)

Keterangan	Jumlah Warkat		Jumlah Harian		Tolakan Harian	
	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (%)	Nominal (%)
Tw IV 06	216,919	4,206,505	3,615	70,108	0.95	0.71
Tw I 07	234,908	4,572,287	3,670	71,442	0.71	0.60
Tw.II 07	235,998	4,562,529	3,806	73,589	0.65	0.52
Tw.III 07	251,711	5,019,948	3,933	78,437	0.79	0.77
Tw.IV 07	236,299	5,176,172	3,692	80,878	0.86	0.81

Sementara itu, persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong per hari pada triwulan laporan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah tolakan cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 0,86 % (berdasarkan jumlah warkat) atau sebesar 0,81% (berdasarkan nominal).

3.2. Transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS) di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru cenderung menunjukkan trend peningkatan baik transfer masuk maupun transfer keluar. Total transfer masuk melalui sistem BI RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp58.587,65 miliar atau naik 11,23% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan total transfer keluar tercatat sebesar Rp37.749,28 miliar atau

naik 44,06% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan demikian terjadi net *incoming transfer* transaksi RTGS sebesar Rp25.838,37 miliar.

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS
(Dalam Miliar)

Keterangan	Kumulatif Triwulanan		Rata-rata Harian	
	Dari	Ke	Dari	Ke
Tw IV 06	29,593.11	60,395.59	485.13	990.09
Tw.I 07	45,252.09	70,619.40	707.06	1,103.43
Trw.II 07	22,489.45	45,146.64	362.73	728.17
Trw.III 07	26,203.53	52,671.98	409.43	823.00
Trw.IV 07	32,749.28	58,587.65	511.71	915.43

4. Lainnya

4.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Pada triwulan laporan terdapat penambahan 3 Pedagang Pedagang Valuta Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Pekanbaru sehingga seluruhnya berjumlah 21 Pedagang Valuta Asing. Berdasarkan data dari 21 Pedagang Valuta Asing tersebut, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) pada periode laporan mencapai USD 3.244 ribu atau meningkat sebesar USD 17 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.227 ribu. Sementara itu nilai penjualan, pada periode laporan mencapai USD 3.197 ribu atau turun sebesar USD 46 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.243 ribu. Penurunan ini disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga permintaan akan valuta asing menurun.

Tabel 5.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Keterangan	Penjualan	Pembelian
	USD	USD
Tw IV 06	2,799.00	2,835.00
Tw.I 07	3,172.00	3,196.00
Trw.II 07	3,216.00	3,241.00
Trw.III 07	3,227.00	3,243.00
Trw.IV 07	3,244.00	3,197.00

4.2. Strategi *Cash Centre* Di Indonesia

Implementasi jangka pendek terhadap kebijakan penerapan *Cash Centre* yang dilaksanakan melalui kegiatan uji coba setoran dan bayaran perbankan antar bank di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Pekanbaru sejauh ini berjalan lancar. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari parameter tidak terjadinya kendala yang cukup berarti dalam kegiatan perkasian bank. Namun pada triwulan laporan jumlah uang yang masuk ke kas Bank Indonesia mencapai Rp642,72 miliar naik 360,98% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp139,42 miliar. Kondisi ini disebabkan sebagian besar anggota bank fokus mengalami overlikuid sehingga Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menerima setoran bank termasuk uang layak edar.